

MITIGASI BENCANA BANJIR BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BABAT

(Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ASTINA WATI

NIM. 145030101111116

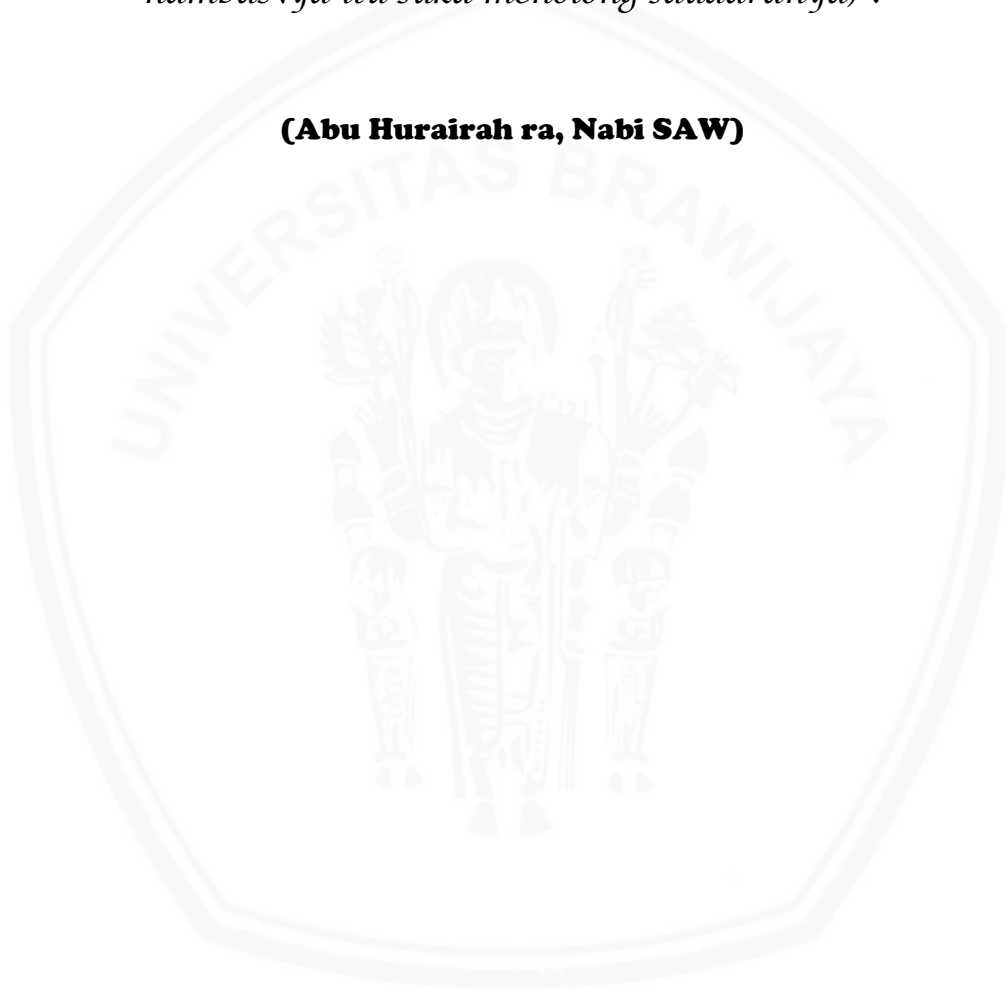


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

*“Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu :
“(Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hambaNya itu suka menolong saudaranya)”.*

(Abu Hurairah ra, Nabi SAW)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : “Mitigasi Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat” (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Astina Wati

NIM : 145030101111116

Fakultas : Ilmu Administrasi

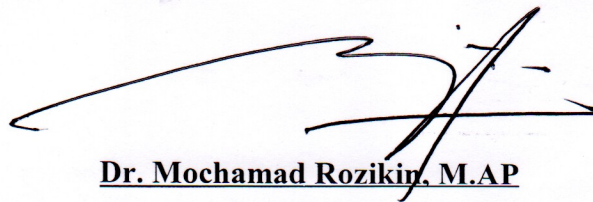
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 05 Juni 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

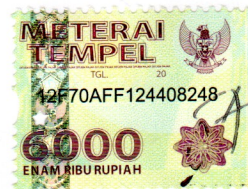
NIP. 19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Mitigasi Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 05 Juni 2018



Astina Wati

145030101111116

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Juli 2018
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Astina Wati
Judul : Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten lamongan)

Dan dinyatakan LULUS

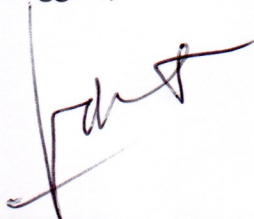
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota,



Prof. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 1954 0306 1979031

Anggota,



Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.S.c
NIP. 201405 870426 1 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya tulisinisayapersembahkankepada :

*Almarhum Ayahanda Rusman dan Ibunda Sulaikah,
serta Kakek saya Tondo, Sahabat, Kakak, Adik dan Teman-*

temansaya selama di Malang yang telah menjadi

keluargakeduasaya di perantauan.

Serta seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya,

khususnya almamater Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya...

SUMMARY

Astina Wati, 2018. **“Participation Flood Mitigation Based on Community Participation in Babat Village”(Study at Regional Disaster Management Agency Lamongan District)**Universitas Brawijaya, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

This research is based on the problem that in the year 2014, the number of flood disaster events as many as 86 events with the victims died and lost 5 people and suffered and evacuated as many as 142,818 inhabitants. Then in 2015, the number of incidents of floods as many as 492 events with the victims died and lost 5 people and suffered and displaced as many as 841,505 inhabitants. In district Lamongan, more floods are caused by the flood of Bengawan Solo, so to overcome the annual floods in either Lamong River or Bengawan Jero area should be normalized drainage channels. So it needs to be done immediately to coordinate with the Ministry of Public Works with the Territory Bengawan Solo River Region to make the acceleration of normalization in Kali Lamong and Bengawan Jero.

This research uses descriptive research type with qualitative approach. The research focus is: 1) To describe and analyze the mitigation of flood prevention based on community participation in Babat Village by Regional Disaster Management Agency of Lamongan Regency. 2) Describe and analyze the efforts undertaken by the Regional Disaster Management Agency to increase community participation in mitigation of flood disaster management in Kelurahan Babat, Lamongan District.

The results of this study are disaster mitigation programs conducted by the Regional Disaster Management Agency of Lamongan District in Babat village such as: Formation of Tangguh Disaster Village or Disaster Risk Reduction Forum, Socialization To all levels of society on the importance of disaster mitigation, capacity of Human Resources, Coordination with all levels of society. The efforts undertaken by the Regional Disaster Management Agency to increase community participation in mitigation of flood disaster management in the village of Babat Lamongan District include: Prevention and Preparedness BPBD Lamongan regency mentions several programs such as bengawan normalization by dredging, installation of water pumps while non-physical is the socialization forming community awareness about waste disposal and land conversion, Improving the role of government partner organizations, and guiding the risk reduction program into development plans. Subsequently, the people of Babat Urban Village also play a role and work directly with their own initiatives and are coordinated with subdistricts and villages such as mutual cooperation strengthen the embankment in the bengawan solo because prone to burst by filling the sandbags and placed on the dike, Increasing the competence of mitigation in flood prevention.

Keywords: Flood Mitigation, Community Participation, Regional Disaster Management Agency District Lamongan.

RINGKASAN

Astina Wati, 2018. **“Mitigasi Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan).** Universitas Brawijaya. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan bahwa pada tahun 2014, jumlah kejadian bencana banjir sebanyak 86 peristiwa dengan korban meninggal dan hilang 5 jiwa serta menderita dan mengungsi sebanyak 142.818 jiwa. Kemudian pada tahun 2015, jumlah kejadian Bencana banjir sebanyak 492 peristiwa dengan korban meninggal dan hilang 5 jiwa serta menderita dan mengungsi sebanyak 841.505 jiwa. Di Kabupaten Lamongan, banjir lebih banyak disebabkan oleh luapan Bengawan Solo, sehingga untuk mengatasi banjir tahunan baik di wilayah Kali Lamong atau Bengawan Jero harus dilakukan normalisasi saluran pembuangan air. Maka perlu dilakukan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melakukan langkah percepatan normalisasi di Kali Lamong dan Bengawan Jero.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis mitigasi penanggulangan banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian ini adalah program-program mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan di kelurahan Babat diantaranya : Pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Sosialisasi Kepada semua lapisan masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Koordinasi dengan semua lapisan masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir di kelurahan Babat Kabupaten Lamongan diantaranya: Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan menyebutkan beberapa program seperti normalisasi bengawan dengan cara dikeruk, pemasangan pompa air sedangkan yang non fisik adalah sosialisasi membentuk kesadaran masyarakat tentang membuang sampah dan alih fungsi lahan, Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan, Selanjutnya masyarakat Kelurahan Babat juga berperan dan berupaya langsung dengan inisiatif sendiri dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan maupun desa seperti bergotong royong memperkuat tanggul di bengawan solo karena rawan jebol dengan cara mengisi karung pasir dan di taruh di tanggul tersebut, Peningkatan kompetensi mitigasi dalam penanggulangan banjir.

Kata Kunci: Mitigasi Penanggulangan Banjir, Partisipasi Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

3. Ibu Dr. Fadilah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.
5. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Administrasi Publik yang pernah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Kepala Pelaksana dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, Lurah beserta seluruh staf Kelurahan Babat, serta semua pihak yang sudah berkenaan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung
8. Orang tua tercinta, Bapak Rusman (Almh) dan Ibu Sulaikah, terimakasih atas do'a, motivasi, semangat dan didikannya selama ini dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat saya, Rina, Ike, Della, Tika, Widi, Amel, May, Dewi, Rahma, Mbak Ocha, Mbak Putri, terima kasih atas segala bantuan, pengalaman, dan tidak pernah bosan memberi semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 05 Juni 2018

Astina Wati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan Dalam Administrasi Publik	17
1. Pengertian Administrasi Publik.....	17
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	18
3. Pengertian Administrasi Pembangunan	20
B. Teori Pembangunan Dan Bencana	21
1. Pengertian Pembangunan	21
2. Tujuan Pembangunan	21
3. Bencana	22
C. Manajemen Bencana.....	31
1. Pengertian Manajemen Bencana	31
2. Mitigasi Bencana	31

3. <i>Stakeholder</i> Mitigasi Bencana	33
4. Dasar Pemikiran Berbasis Partisipasi Masyarakat	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Sumber Data dan Jenis Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	54
H. Keabsahan Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	60
a. Sejarah Kabupaten Lamongan	60
b. Arti Lambang Kabupaten Lamongan	63
c. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan	64
d. Kondisi Demografis	66
e. Kondisi Geografis	68
f. Potensi Ekonomi	71
g. Sosial Budaya Kabupaten Lamongan	76
h. Potensi Bencana Kabuapten Lamongan	81
2. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Lamongan	85
a. Dasar Pembentukan	85
b. Tujuan	86
c. Sasaran	87
d. Visi	88
e. Struktur Organisasi BPBD tahun 2018	89

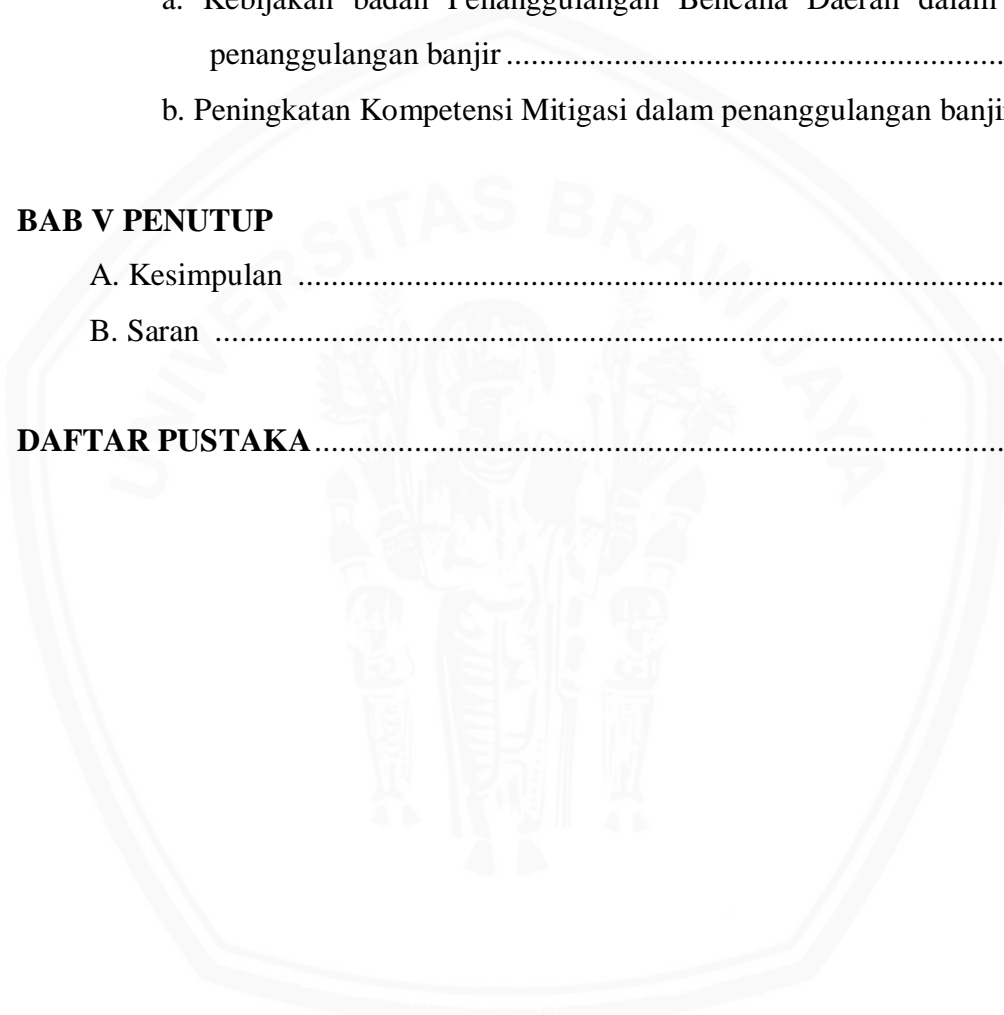
3. Gambaran Umum Kelurahan Babat	91
a. Kondisi Penduduk	91
b. Kondisi Sosial Ekonomi	91
c. Kondisi Sosial Pendidikan	92
d. Struktur Organisasi Kelurahan Babat 2018	94
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	95
1. Mitigasi Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	95
a. Program Mitigasi	95
b. Pra Bencana	96
c. Aktor yang terlibat dalam mitigasi penanggulangan banjir	98
d. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi penanggulangan banjir	104
e. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi penanggulangan banjir	107
2. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan	108
a. Kebijakan badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi penanggulangan banjir	108
b. Peningkatan Kompetensi Mitigasi dalam penanggulangan banjir ...	116
C. Analisis Data	120
1. Mitigasi Penanggulangan Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan	120
a. program Mitigasi	120
b. Pra Bencana	124
c. Aktor yang terlibat dalam mitigasi penanggulangan banjir	125

d. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi penanggulangan banjir	126
e. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi penanggulangan banjir	127
2. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.....	128
a. Kebijakan badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi penanggulangan banjir	128
b. Peningkatan Kompetensi Mitigasi dalam penanggulangan banjir ...	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA	138
-----------------------------	-----



NO.

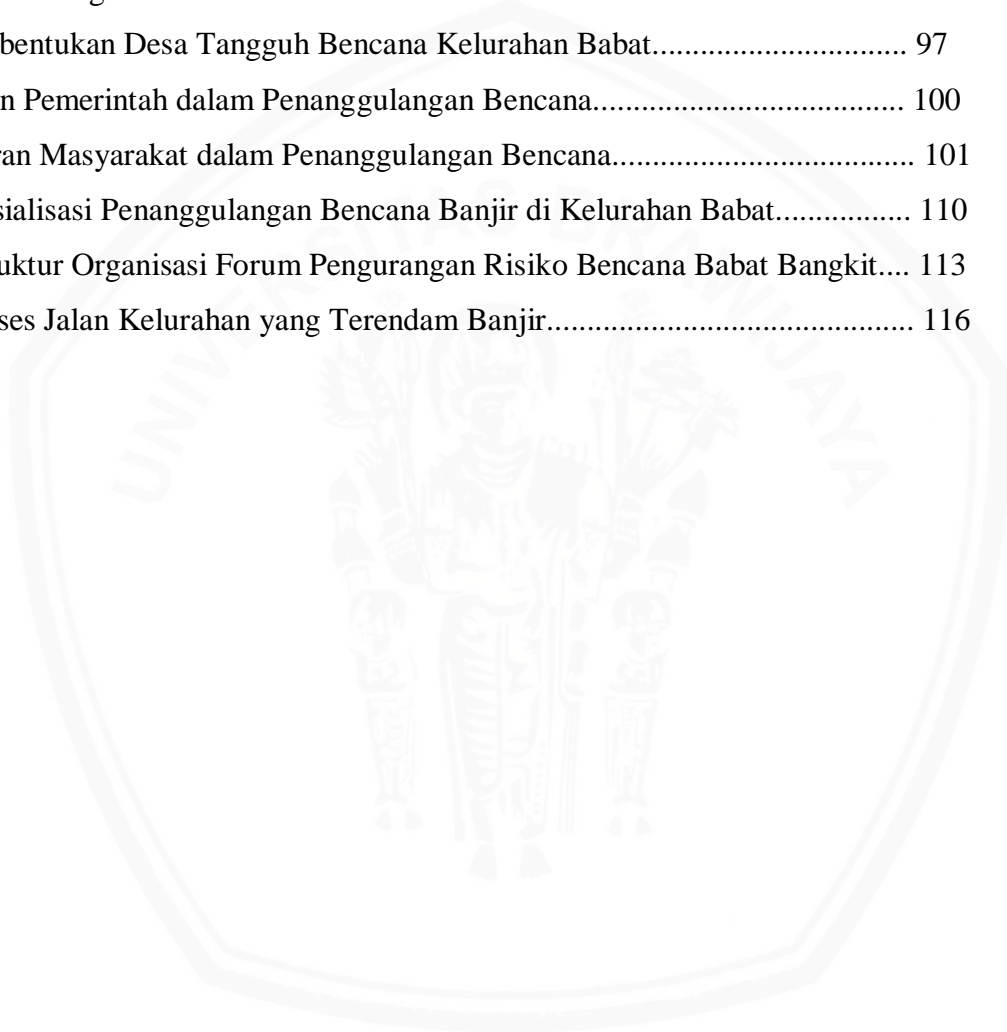
DAFTAR TABEL

1. Bencana Banjir dan Korban di Indonesia	2
2. Bencana Banjir Dan Kerusakan di Indonesia	3
3. Jumlah Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan	8
4. Jumlah Terdampak Bencana Banjir di Kelurahan Babat.....	9
5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan.....	66
6. Pekerja Masyarakat Kelurahan Babat.....	92
7. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Babat.....	93



NO.**DAFTAR GAMBAR**

1. Siklus Penanggulangan Bencana	4
2. Komponen- Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	57
3. Lambang Kabupaten Lamongan.....	63
4. Lokasi Kabupaten Lamongan.....	68
5. Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lamongan.....	86
6. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lamongan.....	90
7. Struktur Organisasi Kelurahan Babat.....	94
8. Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat.....	97
9. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.....	100
10. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.....	101
11. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Babat.....	110
12. Struktur Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit....	113
13. Akses Jalan Kelurahan yang Terendam Banjir.....	116



NO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perda Kabupaten Lamongan Tentang Penanggulangan Bencana..... 138
2. Sosialisasi Pencegahan Bencana di Kelurahan Babat..... 139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografis dan kondisi geologis, wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam. Pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur yang saling bergerak dan bertumbukan, sehingga menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia. Lebih khusus lagi, jalur gempa bumi juga terjadi pada jalur patahan regional seperti Patahan Sumatera/Semangko.

Selain disebabkan oleh faktor geologi tersebut, Indonesia terletak di sekitar Khatulistiwa yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan. Hal ini menyebabkan, secara hidrogeografi wilayah Indonesia rawan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan abrasi. Dampak negatif dari perubahan iklim global semakin membuat wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana terkait dampak perubahan iklim. Kerentanan ini dipengaruhi oleh masalah demografi, antropogenik dan masalah hukum yang tidak terlaksana dengan baik.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat rentan terjadinya bencana alam, salah satunya yaitu bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam paling dapat diperkirakan kedatangannya, karena berhubungan dengan curah hujan yang tinggi. Banjir umumnya didataran, hilir dari suatu DAS yang memiliki pola aliran rapat. Dataran yang menjadi langganan banjir umumnya memiliki kepadatan penduduk tinggi.

Perusakan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali misalnya, menambah frekuensi kejadian bencana yang mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa dan kerusakan di Indonesia (kawasan.bappenas.go.id).

Menurut BNPB, pengurangan risiko bencana menjadi arus utama dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2014-2015 Pemerintah Indonesia telah menurunkan data bencana dan terdampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Bencana Banjir Dan Korban Tahun 2014 – 2015

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal dan Hilang	Menderita dan Mengungsi
		Jiwa	
2014	86	5	142.818
2015	492	39	841.505

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2015

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, jumlah kejadian bencana banjir sebanyak 86 peristiwa dengan korban meninggal dan hilang 5 jiwa serta menderita dan mengungsi sebanyak 142.818 jiwa.

Kemudian pada tahun 2015, jumlah kejadian Bencana banjir sebanyak 492 peristiwa dengan korban meninggal dan hilang 5 jiwa serta menderita dan mengungsi sebanyak 841.505 jiwa.

Tabel 1.1

Bencana Banjir Dan Kerusakan Tahun 2014 - 2015

Tahun	Kerusakan						
	Terendam	Rumah			Fasilitas		
		Berat	Sedang	Ringan	Kesehatan	Peribadatan	Pendidikan
2014	59.228	82	39	238	9	20	10
2015	176.031	657	260	2.425	221	58	16

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2015

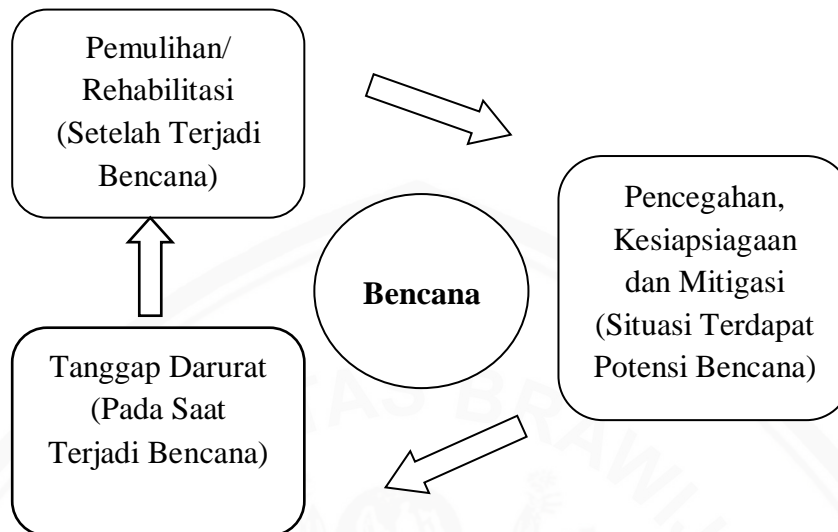
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kerusakan bencana banjir yang terjadi, terendam sebanyak 59.228, rumah berat sebanyak 82 Kepala Keluarga, rumah sedang sebanyak 39 Kepala Keluarga, rumah ringan sebanyak 238 Kepala Keluarga, fasilitas kesehatan sebanyak 9 unit, fasilitas peribadatan sebanyak 20 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 10 unit. Kemudian pada tahun 2015, jumlah kerusakan bencana banjir yang terjadi, terendam sebanyak 176.031, rumah berat sebanyak 657 Kepala Keluarga, rumah sedang sebanyak 260 Kepala Keluarga, rumah ringan sebanyak 2.425 Kepala Keluarga, fasilitas kesehatan sebanyak 221 unit, fasilitas peribadatan sebanyak 58 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 16 unit.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Manajemen bencana merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi maupun menangani dampak dari bencana mulai dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Terdapat tiga tahap yaitu tahap sebelum terjadi bencana, tahap saat terjadi bencana dan yang terakhir merupakan tahap pasca bencana. Tiga tahap tersebut merupakan siklus yang dilakukan dalam manajemen bencana dan tahap sebelum terjadi bencana merupakan tahap yang penting namun sering terlupakan oleh masyarakat karena terkadang kurang peduli terhadap bahaya yang mengancam di sekitarnya. Tahap sebelum terjadi bencana ini terdapat tiga bagian yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pencegahan dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghindari daerah bahaya yang ada, ketika kita mengetahui suatu daerah memiliki potensi terjadi bencana maka kita akan lebih memilih menjauhi daerah tersebut sebagai daerah pemukiman. Berikut adalah gambar siklus penanggulangan bencana :

Gambar 1.1
Siklus Penanggulangan Bencana



Sumber : Panduan Perencanaan Kontigensi (edisi kedua), BNPB 2011

Manajemen bencana yang efektif bergantung pada perencanaan yang terintegasi secara menyeluruh pada setiap tingkat pemerintahan dan organisasi lain yang terlibat. Sedikit sekali pemerintah dan masyarakat maupun swasta yang memikirkan tentang langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Padahal manajemen bencana sangat diperlukan guna untuk meminimalisir dampak bencana itu sendiri. Kegiatan pra bencana merupakan tahap yang paling penting karena tahap ini merupakan modal dalam menghadapi pada saat bencana maupun pada saat pasca bencana. Pemerintah harus tanggap atas bencana yang melanda daerahnya, guna melaksanakan perannya sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas masalah-masalah publik.

Peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah publik merupakan konsep dari administrasi publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan responsibilitas terhadap kebutuhan publik. Administrasi publik, Menurut Chandler dan Plano, adalah proses dimana sumberdaya personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara baik kebutuhan masyarakat. Dari definisi tersebut melihat administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat Keban, (2008: 6).

Good governance merupakan konsep yang memandang kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki oleh pemerintah, melainkan merupakan kerjasama atau partisipasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penciptaan good governance sangat dipengaruhi oleh stakeholders yang terlibat di dalam governance itu sendiri, yakni lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini perlu diupayakan terbentuknya relasi antar stakeholders yang terlibat untuk terciptanya korelasi

yang bersifat *check and balance*. Keberhasilan manajemen bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, meliputi pemerintah, swasta, organisasi-organisasi kemanusiaan dan masyarakat. Partisipasi dari semua kalangan akan memberikan manfaat yang sangat besar. Interaksi *civil society* merupakan sebuah kekuatan untuk berkelanjutan penanganan bencana yang lebih cepat dan efektif. Manajemen bencana penting untuk penanganan peristiwa bencana guna mengurangi atau meminimalkan korban. Pemerintah tidak mampu untuk secara sendirian menangani bencana. Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya bantuan merupakan faktor yang penting.

Banjir merupakan permasalahan umum terjadi di sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah padat penduduk misalnya di kawasan perkotaan. Oleh karena itu kerugian yang ditimbulkannya bisa sangat besar baik dari segi materi maupun kerugian jiwa. Maka sudah layaknya permasalahan banjir perlu mendapatkan perhatian yang serius dan merupakan permasalahan kita semua. Dengan anggapan bahwa, permasalahan banjir merupakan masalah umum, sudah semestinya dari berbagai pihak perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi, untuk memperkecil kerugian yang di timbulkan Kodoatie, (2013: 50).

Tabel 1.2
Jumlah Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan Bulan Januari
– Februari 2018

Nama Kecamatan	Dampak Kerusakan				
	Rumah		Area Pertanian		
	KK	Jiwa	Sawah Ha	Tambak Ha	Perkiraan Kerusakan (Rp.000,000)
Glagah	289	1445		241	1079
Kalitengah	581	670		1097	2277,59
Karanggeneng	21	25		320,22	1020,65
Maduran	282	1325		68	168
Laren	1005	4143		42	898,79
Karangbinangun	288	1132		795,15	712,05
Babat	880	4025		75	187,5
Kedungpring				315	1491
Modo				306	1032
Turi	392			410,5	1077,5
Sukodadi	100			10	
Deket	168	840		674	3370
Pucuk				20	50
Lamongan				10	60
Jumlah Total	4.006	13.605		4.383,87	13.424,68

Sumber : BPBD Kabupaten Lamongan, 2018

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai jumlah terdampak bencana banjir yang cukup tinggi mulai dari bulan Januari sampai Februari yaitu sebanyak rumah 4.006 Kepala Keluarga (KK), jiwa sebanyak 13.605, jiwa, area pertanian mulai dari tambak sebanyak 4.383,87 hektar, perkiraan kerusakan sebanyak 13.424,68 hektar dari seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Lamongan.

Di Kabupaten Lamongan, banjir lebih banyak di sebabkan oleh luapan Bengawan Solo, sehingga untuk mengatasi banjir tahunan baik di wilayah

Kali Lamong atau Bengawan Jero harus dilakukan normalisasi saluran pembuangan air. Maka perlu dilakukan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melakukan langkah percepatan normalisasi di Kali Lamong dan Bengawan Jero. Saat ini sudah dilakukan (pengerukan) di wilayah Bengawan Jero sehingga kedalamannya cukup memadai. Namun permasalahannya, kedalaman saluran pembuangan air yang berada di wilayah Gresik tidak cukup memadai. Sehingga ketika musim hujan tiba, genangan air di Bengawan Jero yang berada di wilayah Lamongan tidak bisa cepat dibuang ke laut. Sementara untuk Kali Lamong perlu membuat semacam storage air di wilayah Lamongan selatan. Storage air tersebut bukan hanya akan bermanfaat untuk mencegah efek banjir di wilayah Gresik, namun juga bisa menjadi solusi sumber air pertanian untuk kawasan selatan yang dikenal kering. Pengertian normalisasi sungai sering dilakukan dengan meluruskan sungai, melebarkan sungai, atau memperdalam penampang, dengan maksud agar aliran air lebih cepat dan kapasitas sungai dalam menampung air menjadi lebih besar (BPBD Kabupaten Lamongan).

Tabel 1.3

Jumlah Terdampak Bencana Banjir di Kelurahan Babat Bulan Maret Tahun 2018

Nama Kelurahan	Dampak Kerusakan				
	Rumah Terendam		Area Pertanian		
	KK	Jiwa	Sawah Ha	Tambak Ha	Perkiraan Kerusakan (Rp.000,000)
Babat	260	1300	-	-	-
Jumlah total	260	1300	-	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Lamongan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Kelurahan Babat merupakan salah satu kecamatan Babat yang terdampak banjir setiap tahunnya. Letak geografis Kelurahan Babat seperti mangkok, jadi setiap tahunnya pasti terdampak banjir. Dari bulan Maret tahun 2018 yaitu sebanyak rumah 260 Kepala Keluarga (KK), jiwa sebanyak 1300 jiwa.

Peran pemerintah daerah menjadi suatu kewajiban yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan kehidupannya, agar rasa aman dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana.

Partisipasi masyarakat di kemukakan oleh Solekhan (2014:97), bahwa proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada

masyarakat, agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif. Sebuah organisasi masyarakat sebaiknya dibentuk untuk mengambil tindakan-tindakan awal dan mengatur peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi banjir sekaligus mengurangi dampaknya.

Menurut Puturuhi (2015: 154), Mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul akibat bencana, titik berat diberikan pada tahap sebelum terjadinya segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia. Masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat berperan secara signifikan dalam manajemen bencana banjir yang bertujuan untuk memitigasi dampak dari bencana banjir. Mitigasi bencana merupakan salah satu strategi dalam upaya penanggulangan bencana. Langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu tolak ukur dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi atau

meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa mitigasi penanggulangan banjir di Kabupaten Lamongan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan tanggung untuk menuntaskan masalah penanggulangan banjir di Kabupaten Lamongan, untuk itu dalam mengatasi penanggulangan banjir, BPBD Kabupaten Lamongan melakukan normalisasi saluran pembuangan air di Kali Lamong dan Bengawan Jero dalam penanggulangan banjir tahunan.

Permasalahan penanggulangan banjir merupakan permasalahan yang kompleks, oleh karena itu perlu kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk berusaha melakukan pencegahan-pencegahan terhadap terjadinya banjir. Kita dapat mengetahui besarnya ancaman banjir berdasarkan analisis data curah hujan dan kondisi daerah aliran sungai yang ada. Salah satu usaha mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan hidup. Jika pemerintah dan masyarakat tanggap terhadap penanggulangan banjir dan peka terhadap lingkungan kemungkinan ancaman banjir dapat diminimalisir, mitigasi akan efektif dan banjir dapat dikendalikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MITIGASI BENCANA BANJIR BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BABAT (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirinci tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis program-program mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademik

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat (studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka menambah wawasan.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan tentang mitigasi penanggulangan banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat (studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media sosial kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami dan menyikapi secara baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar deskripsi dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat sistematika penulisan skripsi ini yang merupakan pemadatan keseluruhan isi skripsi secara singkat dan disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian mengenai latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. Rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, serta dijelaskan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Konsep-konsep, pendapat-pendapat atau teori yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta berisi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan Dalam Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Madenan Sosromidjojo (1963) dalam Syamsuddin (2010:3) Administrasi adalah “tata usaha” yang di maksud dengan istilah aturan-aturan mengenai pelaksanaan tugas meliputi tiga bidang urusan yang bersifat umum dan penting yang terdapat di tiap-tiap kantor, instansi atau badan, mengenai : a) urusan umum, b) urusan keuangan, c) urusan kepegawaian.

Menurut H. George Frederickson dalam Pasolong (2012:54) menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif yaitu :

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- b. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”.
- d. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena pososinya juga dianggap sebagai publik.
- e. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Administrasi Publik menurut Dwight Waldo dalam Syamsuddin (2010:117) administrasi publik adalah “manajemen dan organisasi dari

manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Nicholas Henry dalam Syamsuddin (2010:116) mendefinisikan administrasi publik adalah “suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Melihat beberapa pendapat mengenai administrasi publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin lama semakin semakin tinggi, diperlukan metode-metode atau cara untuk memecahkan masalah tersebut yakni melalui konsep paradigma yang semakin berkembang pada masa tertentu.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Apapun makna yang melekat atau dilekatkan pada teori oleh para pengajurnya, teori berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan gejala atau fenomena. Fenomena yang semrawut dapat dijelaskan, disederhanakan dan dipecahkan oleh teori. Dengan demikian maka teori itu sebenarnya dibangun berdasarkan fakta. Sebaliknya praktik administrasi harus juga didasarkan pada teori. Terjadilah hubungan simbiosis mutualistik yang baik. Karena sebenarnya pertentangan antara teori dan praktik tidaklah relevan lagi. Teori dibangun berdasarkan fakta

dan praktik harus didasarkan pada teori. Menurut Zauhar (2001:59) dilingkungan ilmu administrasi, teori administrasi berfungsi sebagai:

- a. Pedoman untuk bertindak;
- b. Pedoman untuk mengumpulkan fakta;
- c. Pedoman untuk memperoleh pengetahuan baru;
- d. Pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat administrasi.

Kemudian menurut Mufiz dalam Zauhar (2001:59), bahwa ada lima sebab kenapa teori administrasi publik penting. Kelima sebab itu meliputi:

- a. Teori administrasi publik menyatakan sesuatu yang bermakna, yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata.
- b. Teori administrasi dapat menyajikan suatu perspektif.
- c. Teori administrasi merangsang lahirnya cara-cara baru dalam hal-hal yang berbeda.
- d. Teori administrasi yang telah ada dapat merupakan dasar untuk mengembangkan teori administrasi lainnya.
- e. Teori administrasi membantu penggunaannya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya.

Demikianlah apabila kita menghadapi berbagai macam masalah, apakah masalah untuk dipecahkan secara praktis, masalah pengumpulan fakta atau masalah di dalam mengembangkan pengetahuan administrasi, teori akan banyak berbicara. Kegunaan atau fungsi administrasi yang beraneka ragam itulah yang menyebabkan beraneka ragamnya teori administrasi publik dan bervariasinya teori administrasi. Variasi ini muncul di samping sebab seperti dipaparkan di atas, disebabkan pula oleh perbedaan visi pencetusnya dan perbedaan kondisi yang dihadapi oleh administrasi itu sendiri.

Esensi hubungan administrasi publik dengan administrasi pembangunan tampak jelas dalam setiap kegiatan pembangunan yang tidak pernah lepas dari sistem administrasi. Dalam konteks administrasi

publik, kerja sama tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan suatu negara, yaitu pemerintah dan masyarakat. Namun yang berperan sebagai pemegang kendali dalam administrasi pembangunan ialah pemerintah. Pemerintah menjalankan tugas kerja sama untuk pencapaian sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan.

Menurut saya sendiri, keterkaitan administrasi publik dengan administrasi pembangunan menggambarkan suatu hubungan yang sempurna, dimana terdapat korelasi yang sangat erat antara administrasi publik dan administrasi pembangunan. Administrasi publik diperlukan dalam administrasi pembangunan karena digunakan untuk menyusun program-program pembangunan ke dalam suatu organisasi yang terarah. Administrasi publik menjadi alat utama dalam proses administrasi pembangunan.

3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2012:4) Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi, dan (2) pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh

oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Dari pembahasan di atas pengertian Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

B. Teori Pembangunan Dan Bencana

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian (1983) dalam Suryono (2010:46) Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

2. Tujuan Pembangunan

Menurut Suryono (2010:77) tujuan teori pembangunan secara umum bertujuan untuk :

- a. Menganalisis kelayakan teori-teori pembangunan yang berkembang selama ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kontemporer (*theoretical adequacy*).
- b. Membandingkan antara teori dengan kenyataan fakta dan data lapangan (*empirical validity*).
- c. Menganalisis konsistensi dan relevansi teori dengan kebijakan (*policy effectiveness*).
- d. Menjelaskan dan membuktikan seberapa kuat (intensitas) pengaruh teori terhadap metodologi penelitian (*methodological soundness*).
- e. Sebagai landasan kritik teori dan debat teori (*critical analysis*).

Sedangkan tujuan teori pembangunan secara khusus bertujuan untuk :

- a. Memperkenalkan beberapa teori tentang proses terjadinya *under devolepment* di negara yang sedang berkembang atau negara yang sedang membangun.
- b. Memperkenalkan beberapa teori tentang bagaimana merubah keadaan *under development* menjadi negara dan masyarakat yang *developed* (maju).
- c. Mengaitkan kajian-kajian teori tersebut dengan fenomena-fenomena pembangunan yang terjadi di indonesia (secara kontekstual).

Hasil pembangunan akan rusak ketika terkena bencana, sehingga pentingnya pembangunan infrastruktur pascabencana secara jelas dipaparkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (pasal 1 ayat 11, ayat 12, dan ayat 15). Pembangunan infrastruktur yang dimaksud pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama adalah untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur di daerah bencana meliputi pembangunan kembali rumah penduduk, memperbaiki infrastruktur transportasi , pendidikan, dan kesehatan. Karena itu sangat penting pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, agar perekonomian kembali bergerak dan seluruh aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa. Tentu saja daerah-daerah yang terkena

bencana membutuhkan aliran dana (dari pemerintah maupun swasta) guna membangun kembali infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Bencana

a. Pengertian Bencana

W. Nick Carter dalam (Nurjanah dkk, 2013:10) memberikan definisi bencana berdasarkan concise Oxford dictionary sebagai *“sudden or great misfortune, calamity”*. Sedangkan berdasarkan *Internasional Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR-2002,24)* adalah :

“ A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources”.

Atau :

“ Suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdaya”.

Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana disebutkan diatas, dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:

- 1) Ada peristiwa;
- 2) Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
- 3) Terjadi secara tiba-tiba (sudden) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (slow);
- 4) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian social-ekonomi, kerusakan lingkungan;
- 5) Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam dapat disebut bencana ketika masyarakat/manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulangnya. Ancaman alam itu sendiri tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapi pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak (Nurjanah dkk,2013:13).

b. Bahaya (Hazard)

Bahaya adalah suatu fenomena yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya dapat muncul secara maupun lambat tau bertahap seperti proses-proses yang terjadi dari dalam Bumi salah satunya pergeseran kulit Bumi yakni degradasi lahan di

perbukitan yang mengakibatkan longsor. Proses perubahan secara dinamis dari bumi ini merupakan potensi ancaman bahaya bagi manusia.

c. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator : (1) persentase kawasan terbangun, (2) kepadatan bangunan, (3) persentase bangunan konstruksi darurat, (4) jaringan listrik, (5) rasio perpanjangan jalan, (6) jaringan telekomunikasi, (7) jaringan PDAM, (8) jalan kereta api.

d. Risiko Bencana (Disaster Risk)

Dalam Manajemen Bencana, risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan permukaan muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal. Sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi,

sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat.

e. Macam-Macam Bencana Dan Bahaya Bencana

Salah satu upaya mitigasi yang paling utama adalah mengenal macam-macam bencana dan bahaya dari bencana, karena sebagian bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya. Dengan memahami tentang karakteristik bencana dan ancamannya, maka masyarakat dapat mengetahui apa saja bahaya bencana yang akan dihadapinya dan dapat menyiapkan upaya mitigasi. Di Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik karena alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana terjadi di Indonesia, yang paling dominan adalah banjir, tanah longsor dan kekeringan.

1) Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai

akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

2) Tanah Longsor

Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau batuan maupun percampuran dar keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa ada pemicunya. Proses pemicu longsoran dapat berupa :

- a) Peningkatan kandungan air dalam lereng, sehingga terjadi akumulasi air yang merengangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah untuk longsor. Peningkatan kandungan air ini sering disebabkan oleh meresapnya air hujan, air kolam/selokan yang bocor atau air sawah ke dalam lereng.
- b) Getaran pada lereng akibat gempa bumi ataupun ledakan, penggalian, getaran alat/ kendaraan. Gempa bumi pada pada tanah pasir dengan kandungan air sering mengakibatkan *liquifaction* (tanah kehilangan kekuatan geser dan daya dukung, yang diiringi dengan penggenangan tanah oleh air dari bawah tanah).
- c) Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Beban yang berlebihan ini dapat berupa beban bangunan atau pohon-pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari 40 derajat.
- d) Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga.

3) Kekeringan

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup,

pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dan ulah manusia, sebagai berikut :

a) Adanya penyimpangan iklim

Penyimpangan iklim, menyebabkan produksi uap air dan awan di sebagian Indonesia bervariasi dari kondisi sangat tinggi ke rendah atau sebaliknya. Ini semua menyebabkan penyimpangan iklim terhadap kondisi normalnya. Jumlah air dan awan yang rendah akan berpengaruh terhadap curah hujan, apabila curah hujan dan intensitas hujan rendah akan menyebabkan kekeringan.

b) Adanya gangguan keseimbangan hidrologi

Kekeringan juga dipengaruhi oleh adanya gangguan hidrologis seperti :

- Terjadinya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama bagian hulu mengalami alih fungsi lahan dari bervegetasi menjadi non vegetasi yang menyebabkan terganggunya sistem peresapan air tanah.
- Kerusakan hidrologis daerah tangkapan air bagian hulu menyebabkan waduk dan saluran irigasi terisi sedimen, sehingga kapasitas tampung air menurun tajam.
- Rendahnya cadangan air waduk yang disimpan pada musim penghujan akibat pendangkalan menyebabkan cadangan air musim kemarau sangat rendah sehingga memicu terjadinya kekeringan.

c) Kekeringan agronomis

Kekeringan agronomis, terjadi sebagai akibat kebiasaan petani memaksakan menanam padi pada musim kemarau dengan ketersediaan air yang tidak mencukupi dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber-sumber akibat perbuatan manusia.

4) Kebakaran Lahan Dan Hutan

Suatu kondisi di mana lahan dan hutan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan atau hasil hutan dan berakibat kerugian secara ekonomis dan nilai lingkungan. Dalam kaitan ini terdapat perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya lahan dan hutan dalam mendukung

kehidupan yang berkelanjutan. Faktor penyebabnya antara alam.

Aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan lahan hutan dapat menyebabkan kebakaran. Faktor alam dapat memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Jenis tanaman yang sejenis dan memiliki titik bakar yang rendah serta hutan yang terdegradasi juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap bahaya kebakaran. Angin yang cukup besar juga dapat memicu dan mempercepat menjalarnya api. Topografi yang terjal semakin mempercepat merembetnya api dari bawah ke atas.

5) Angin Badai

Pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam satu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Sistem pusaran ini bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Di Indonesia, angin ini terkenal sebagai badai, di Samudra Pasifik dikenal sebagai

angin taifun, di Samudra Hindia disebut siklon, dan di amerika dinamakan *hurricane*.

6) Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran atau pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba. Penyebab gempa bumi yang selama ini disepakati antara lain dari proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, pergerakan geo-morfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuh tanah, dan aktivitas Gunung api serta ledakan nuklir.

7) Tsunami

Tsunami sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Penyebab terjadinya tsunami antara lain gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi/perpindahan masa tanah/batuan yang sangat besar di bawah air (laut/danau), tanah longsor dibawah tubuh air/laut, dan letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pulau.

8) Letusan Gunung Api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan erupsi. Gunung api adalah

bentuk timbunan (kerucut lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan atau magma/rempah lepas/ gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Bahaya letusan gunung api ini dapat berupa awan panas, lontiran material/pijar, hujan abu lebat, lava, gas, racun, tsunami dan banjir.

Penyebab terjadinya gunung api adalah pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi, akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma yang menimbulkan pelepasan energi. Mekanisme kerusakan bahaya letusan gunung api dibagi menjadi dua berdasarkan waktu terjadinya, yaitu (1) bahaya utama (*primer*) dan (2) bahaya sekunder (*sekunder*) dan jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan.

C. Manajemen Bencana

1. Pengertian Manajemen Bencana

Menurut Nurjanah dkk (2013:45) Manajemen Bencana (Disaster Management) adalah pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen

yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuacting*, dan *controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari (ancaman) bencana.

2. Mitigasi Bencana

Menurut Priambodo (2009:19-20), pada tahap pra bencana kegiatan mitigasi bencana, mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi konsekuensi bencana dan marabahaya. Mitigasi merupakan upaya mengurangi kerawanan dan kerapuhan yang ditemukan dalam komunitas, baik sebelum maupun sesudah terjadi bencana. Misalnya, sebelum terjadi tanah longsor dapat dilakukan pengendalian penggundulan hutan atau membuat kontruksi bangunan dibuat menjadi tahan gempa. Semua itu merupakan upaya mitigasi sebelum terjadi bencana. Bila dilakukan setelah bencana terjadi, mitigasi merupakan bagian integral dari pada fase rekontruksi atau rehabilitasi.

Mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindari atau menekan bencana yang akan datang yakni, menggali informasi dan mengumpulkan data-data dari peristiwa bencana sebelumnya untuk dijadikan pelajaran berharga. Contohnya bangunan-bangunan yang rusak karena gempa akan memberikan data tentang kelemahan dan ketangguhan fisik bangunan, sehingga dapat dilakukan perbaikan struktur bangunan tersebut. Selain

itu dapat dilakukan dengan mengkuji kembali tata ruang agar menjadi tempat yang kondusif bagi masyarakat. Misalnya lahan yang goyah karena terkena dampak gempa bumi atau tempat pemukiman yang berada di daratan rawan banjir sebaiknya tidak dipakai lagi.

Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Mitigasi pasif dapat berupa penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan standar atau prosedur perencanaan pembangunan, dan mengkaji lebih dalam tentang risiko bencana. Mitigasi aktif antara lain membuat tanda-tanda bahaya dan larangan pada daerah rawan bencana, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman serta melakukan penyuluhan dan memberikan pelatihan dasar waspada terhadap bencana.

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Upaya-upaya mitigasi dapat pula diintegrasikan ke dalam rencana-rencana peningkatan kesiapan tanggap-darurat untuk bencana lain yang mungkin akan terjadi pada waktu mendatang. Upaya mitigasi dan rencana program pembangunan jangka panjang dapat mempunyai tujuan akhir yang mirip satu dengan yang lainnya dan dapat saling mengisi. Kegiatan mitigasi

menjadi tanggungjawab semua pihak atau stakeholders baik itu pemerintah maupun masyarakat. Sehingga kebersamaan mereka menjadi faktor penting bagi keberhasilan mitigasi bencana.

3. *Stakeholder* Mitigasi Bencana

Good Governance merupakan konsep yang memandang kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki pemerintah, melainkan merupakan kerjasama atau partisipasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Administrasi Publik Indonesia melalui LAN (2000) mengartikan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, yaitu penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Penciptaan *Good governance* sangat dipengaruhi oleh *stakeholders* yang terlibat dalam *governance* itu sendiri, yakni lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini perlu diupayakan terbentuknya relasi antar *stakeholders* yang terlibat untuk terciptanya korelasi yang bersifat *check and balance*.

Keberhasilan manajemen bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, meliputi pemerintah, swasta, organisasi-organisasi kemanusiaan dan masyarakat. Partisipasi dari semua kalangan akan memberikan manfaat yang sangat besar. Interaksi *civil society* merupakan sebuah kekuatan untuk keberlanjutan penanganan bencana yang lebih cepat dan efektif. Manajemen bencana penting untuk penanganan

peristiwa bencana guna mengurangi ataupun meminimalkan korban. Pemerintah tidak mampu untuk secara sendirian menangani bencana. Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya bantuan merupakan faktor yang paling penting.

Keberhasilan manajemen bencana tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta, organisasi kemanusiaan (LSM) dan masyarakat. Upaya *response* dan *recovery* dalam manajemen bencana berkaitan dengan interaksi pemerintah, organisasi kemanusiaan dan *grassroot* dalam *civil society*. Spirit aktivitas *civil society* muncul berkaitan dengan penanganan peristiwa bencana yang tidak terfuga, sehingga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak di wilayah yang terkena dampak bencana. Cepat lambatnya pemulihan sangat tergantung pada beberapa faktor seperti keputusan politik pemerintah, kerjasama berbagai pihak utamanya antara pemerintah, masyarakat dan masyarakat dunia.

a. Pemerintah

Pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol manajemen bencana secara efektif. Kemampuan itu meliputi untuk perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak

utama yang harus merespon bencana alam. Bantuan bilateral atau multilateral hanya dapat dihadirkan bila ada permintaan dari pemerintah yang mengalami bencana.

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bentuk tanggap bencana meliputi :

- 1) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- 3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- 4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- 5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diberikan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
 - a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
 - c) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten/kota.
 - d) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayah.
 - e) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
 - f) Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Memang secara nyata pelaksanaan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada. Dalam konsep pelaksanaan *Good Governance*, terdapat 3

pilar utama yang saling mendukung guna mewujudkan pelaksanaan bencana yang optimal, yakni Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

Pemerintah Daerah selaku koordinator harus mampu mengarahkan masyarakat dan dunia usaha untuk turut serta berpartisipasi aktif mengikuti garis kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah, baik ketika bencana belum terjadi, pada saat bencana terjadi, maupun setelah bencana terjadi (*recovery-tasks*). Pemerintah Daerah juga sebaiknya secara tegas melakukan upaya pemindahan penduduk/ masyarakat dari daerah yang masuk dalam zona rawan bencana ke daerah lain yang tidak rawan bencana. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban dan kerugian lainnya yang mungkin timbul. Untuk dapat melakukan tindakan ini, Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tersebut akan kondisi di daerah tersebut akan kondisi di daerah tersebut dan kerugian-kerugian yang mungkin dialami. Hal serupa pun dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada dunia usaha/swasta yang akan menanam investinya pada kawasan yang rawan bencana. Dalam hal yang lebih ideal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan dan larangan

aktivitas masyarakat dan dunia usaha pada daerah rawan bencana.

b. LSM dan Swasta

Upaya respons dan pemulihan bencana mendorong tumbuhnya berbagai organisasi kemanusiaan. Situasi dan kondisi akibat bencana memerlukan persiapan secara aktif dan sumberdaya yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang dilakukan. Kejadian yang besar memerlukan aktivitas yang besar pula. Seiring dengan banyaknya peristiwa bencana alam di dunia mendorong adanya peningkatan jumlah operasi bantuan kemanusiaan. Kerusakan akibat bencana memerlukan bantuan tidak hanya dari pemerintah dalam upaya respon dan pemulihan bencana. Peningkatan jumlah peristiwa bencana pada berbagai Negara mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi dalam bantuan bencana antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmental Organization* (NGO), Organisasi profesional dan bisnis, sukarelawan, tentara serta keterlibatan masyarakat diluar wilayah bencana.

c. Masyarakat

Mempersiapkan masyarakat pada keadaan *emergency* dan bencana merupakan salah satu perencanaan manajemen bencana yang cukup efektif pada tingkat lokal. Perlu dipotimalkan peran serta masyarakat dalam respon bencana

melalui pendidikan manajemen bencana pada masyarakat. Perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah khususnya wilayah bencana, merupakan hal yang penting. Adanya grup komunitas yang terbentuk kelompok masyarakat, pada koordinasi, pada saat setelah peristiwa bencana merupakan kontribusi yang sangat besar bagi kesuksesan proses *response* dan *recovery*. Munculnya partisipasi masyarakat, dalam grup-grup masyarakat, merupakan grup grassroot yang berperan penting dalam sistem manajemen bencana Hadi purnomo dan Ronny Sugiantoro, (2010:107).

Partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari input lingkungan yang memiliki peranan sangat penting, melalui partisipasi masyarakat diharapkan adanya kelancaran, kerjasama, simpatik dapat menimbulkan dan dapat mengurangi kendala-kendala di lapangan pada saat pelaksanaan program penanggulangan bencana.

d. Dasar Pemikiran Berbasis Partisipasi Masyarakat

Menurut Purwanto (2008) bahwa pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* mengisyaratkan tentang perlunya pemerintah melibatkan berbagai *stakeholder* di luar pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi tidak hanya sebatas sebagai keterlibatan warga dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai aktivitas yang

berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Demokrasi akan berarti ketika masyarakat atau warga negara sebagai *stakeholder* utama yang dilibatkan dalam proses pembuatan semua jenis kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses dan implementasi kebijakan publik akan berujung pada terwujudnya *good governance*. Selain itu adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik ada beberapa keuntungan, meliputi :

- 1) Adanya peningkatan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat, dimana dalam pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada ditangan pemerintah tetapi adanya partisipasi masyarakat aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat tersebut.

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*), *good governance* memiliki delapan prinsip, meliputi :

- 1) Partisipasi, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) Transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.
- 3) Akuntabel, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan bentuk tanggung jawab tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- 4) Efektif dan efisien, proses pemerintah dan lembaga yang sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin.
- 5) Kepastian hukum, kerangka hukum yang harus adil dan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- 6) Responsif, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

- 7) Konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang baik bagi kelompok masyarakat dan kebijakan dalam prosedur.
- 8) Setara dan inklusif, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan diatur secara ketat oleh pemerintah. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Sedangkan sistem desentralisasi, wewenang peraturan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara kompleks, tetapi dalam bentuk kontinum dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat H.A.R Tialar, (2002).

Menurut keraf, (2002) kerajinan lokal (*local wisdom*) merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau ketika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis.

Nilai-nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memiliki peranan dalam sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Jenis-jenis penelitian dapat digolongkan menjadi tiga, yakni :

1. Pertama adalah penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori;
2. Kedua adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti;
3. Ketiga adalah penelitian eksplorasi, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, maka jenis penelitian yang sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mathew B. Miles dan Michael Huberman (2014) bahwa :

“analisis data deskriptif adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat-alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan”.

Menurut Moleong (2014:6) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi, mendiskripsikan tentang mitigasi penanggulangan banjir berbasis partisipasi masyarakat di kelurahan Babat, khususnya implementator tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, yang memiliki konsen terhadap penanggulangan bencana di daerahnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012:34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pemilihan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) dalam berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam serta timbulnya hipotesis dalam sosial yang diteliti.

Luasnya masalah dalam suatu penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk menentukan fokus penelitian agar dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus Penelitian menyatakan pokok permasalahan yang dijadikan sebagai pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian adalah :

1. Mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan :
 - a. Program Mitigasi
 - b. Aktor yang terlibat :
 - 1) Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Swasta.
 - 2) Peran dari masing-masing aktor dalam mitigasi penanggulangan banjir
 - 3) Hubungan atau Koordinasi terhadap mitigasi penanggulangan banjir
 - c. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi penanggulangan banjir
 - d. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi penanggulangan banjir
2. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kelurahan Babat Kabupaten Lamongan :

- a. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir.
- b. Peningkatan Kompetensi Mitigasi dalam bencana banjir

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan oleh penelitian dalam memperoleh data primer sehingga dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek penelitian sudah ditetapkan sehingga akan mempermudah penelitian melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Lamongan. Sedangkan situs penelitian yang dipilih adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dan Kelurahan Babat. Alasan dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi dan situs penelitian ini dikarenakan Kabupaten Lamongan termasuk daerah rawan bencana banjir. Dari situs inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, serta dapat merumuskan usaha yang tepat untuk permasalahan tersebut.

D. Sumber Data Dan Jenis Data

Keberadaan suatu jenis sumber data sangat diperlukan penulis dalam penelitiannya, karena sumber data digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data Primer

Merupakan data asli yang memuat atau data yang langsung diperoleh dari informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer dan sumber data dalam penelitian ini dinamakan sebagai informasi atau melalui kunjungan langsung ke lokasi ataupun situs penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah :

- 1) Bapak Zaini, SH, MSi selaku bagian Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
- 2) Bapak Gunawan, SE, MM selaku bagian Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
- 3) Bapak Sueb, SH selaku bagian Kasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
- 4) Ibu Drs.Siti Aminah, MM selaku bagian Lurah Kelurahan Babat
- 5) Bapak Nurul Misbah, SH selaku bagian Sekretaris Camat Kecamatan Babat
- 6) Bapak H. Mochamad Saemuri, SH selaku bagian Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat
- 7) Bapak Ridwan Malik selaku masyarakat Kelurahan Babat
- 8) Bapak Suyatno Efendi selaku masyarakat Kelurahan Babat
- 9) Bapak Muhammad Yasin selaku masyarakat Kelurahan Babat

2. Data sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui dokumen, laporan-laporan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah :

- 1) Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mengenai banjir yang ada di Kabupaten Lamongan
- 2) Dokumen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat
- 3) Surat Keputusan Lurah Kelurahan Babat tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Desa Tangguh Bencana
- 4) Data Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan mengenai banjir di wilayahnya.
- 5) Berita-berita tentang banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

Menurut Arikunto (2010:45) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian hal ini peneliti membagi sumber data sebagai berikut :

- a. Informasi, penelitian dalam menentukan informasi pada awalnya dengan melakukan pengamatan atau prariset terlebih dahulu. Kemudian, peneliti dapat memilih informasi secara *purposive* (bertujuan). Informan dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki informasi yang menguasai informasi serta yang bersedia juga untuk memberikan informasi bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti berperan untuk menentukan kata kunci dalam menemukan serta mengumpulkan informasi yang relevan serta melihat pemahaman informan terhadap apa yang diteliti dalam mendukung penelitian yang dilakukan.
- b. Dokumen, merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh dan melalui bahan-bahan yang tertulis seperti peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau relevan dengan mitigasi penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.
- c. Tempat dan peristiwa, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber tambahan baik melalui observasi langsung yang berkaitan dengan proses mitigasi penanggulangan banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010:135), adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Obsevasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati fenomena guna memperoleh informasi untuk menunjang dan memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang di observasi ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu dalam waktu 2 bulan, dengan durasi 2-3 jam per observasi. Alat bantu yang digunakan dalam observasi berupa *indera mata* yang digunakan untuk melihat dan mengamati peristiwa-peristiwa yang mungkin menunjang dalam penelitian ini, untuk menunjang kegiatan-kegiatan obsevasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara disebut juga sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi. Pada proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian yang ada dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang diteliti, memiliki data dan bersedia memberikan data kepada peneliti. Dalam

penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Kelurahan Babat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

Narasumber terdiri dari :

- 1) Bapak Zaini, SH, MSi selaku bagian Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
 - 2) Bapak Gunawan, SE, MM selaku bagian Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
 - 3) Bapak Sueb, SH selaku bagian Kasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
 - 4) Ibu Drs.Siti Aminah, MM selaku bagian Lurah Kelurahan Babat
 - 5) Bapak Nurul Misbah, SH selaku bagian Sekretaris Camat Kecamatan Babat
 - 6) Bapak H. Mochamad Saemuri, SH selaku bagian Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat
 - 7) Bapak Ridwan Malik selaku masyarakat Kelurahan Babat
 - 8) Bapak Suyatno Efendi selaku masyarakat Kelurahan Babat
 - 9) Bapak Muhammad Yasin selaku masyarakat Kelurahan Babat
- 1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa Koran, surat, gambar, ataupun tulisan lain.

Menurut Creswell (2012:267), kelebihan dari metode dokumentasi antara lain memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan, dapat diakses kapan saja, sumber informasi yang tidak terlalu menonjol membantu peneliti menyajikan data yang berbobot, sebagai bukti tertulis dan data ini benar-benar dapat menghemat waktu penelitian dalam mentranskrip. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mengenai banjir yang ada di Kabupaten Lamongan
- 2) Dokumen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat
- 3) Surat Keputusan Lurah Kelurahan Babat tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Desa Tangguh Bencana
- 4) Data Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan mengenai banjir di wilayahnya.
- 5) Berita-berita tentang banjir di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2012:61) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang telah ditemukan melalui obsevasi dalam wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand questions, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Selanjutnya Nasution (Sugiyono,2012:60-61), menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas. Segal sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian tersebut. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas tersebut, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Menurut Sugiyono (2012:222) yang menjadi salah satu instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri yaitu instrumen utama dalam menangkap atau melihat fenomena secara langsung melalui wawancara. Menurut Moleong (2014:78), salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal tersebut dikarenakan, dalam melakukan penelitian kualitatif, baik

observasi maupun wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, sehingga peneliti bisa menangkap fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan serta mampu menguasai data-data yang telah diperoleh di lapangan.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini berguna untuk mengarahkan dan membatasi penelitian dalam melakukan pencarian data yang diperlukan melalui wawancara yang akan dilaksanakan. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan wawancara agar saat melakukan wawancara dengan informan, peneliti sudah mempunyai daftar pertanyaan dan data yang diinginkan serta dapat memperdalam data dan informasi yang telah didapatkan sebelumnya.
3. Catatan lapangan (*field note*), *voice recorder*, dan foto melalui HP, serta alat tulis. Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan catatan lapangan untuk mencatat fenomena tersebut bisa direkam menggunakan *voice recorder* atau difoto menggunakan *Handphone* (HP) sebagai penunjang dan penguat dalam pengumpulan data dan informasi.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data akan sangat memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Sehingga, peneliti

menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Model analisis data interaktif dalam menganalisis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, data yang diperoleh tersebut dijabarkan data kedalam unit-unit, dan dilakukan analisis data untuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh memiliki makna agar dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, analisis data model interaktif menjelaskan tentang pengangkatan dan penempatan bidang secara lebih mendalam.

Menurut model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014), untuk menganalisis data dan hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan dalam analisis data, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

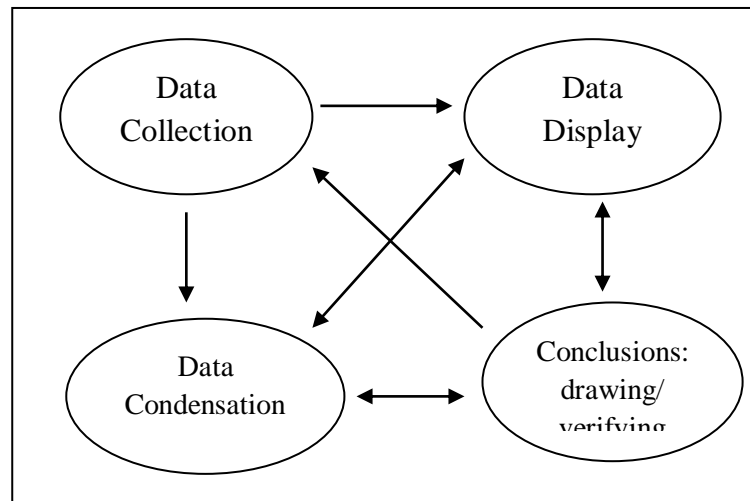
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya, direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi. Data yang diperoleh dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan tersebut, diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikondensasi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Berikut ini adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) :



Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana 2014

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif akan dikatakan absah bila mengandung nilai-nilai terpercaya. Penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2014:330-332) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Data tersebut digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Melalui triangulasi, peneliti dapat ulang temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Oleh karena itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengecek dengan berbagai sumber data,

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam teknik pemeriksaan keabsahan data (triangulasi), antara lain adalah sebagai berikut (Moleong, 2014: 330-332):

1. Triangulasi Sumber, yakni membandingkan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
2. Triangulasi Metode dilakukan dua strategi yakni pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Penyidik, yakni dengan cara membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi Teori, yakni berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Penelitian menggunakan triangulasi sumber pada penelitian ini, triangulasi sumber dapat ditempuh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Sejarah Kabupaten Lamongan

Dulu Lamongan merupakan Pintu Gerbang ke Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Panjalu, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Singosari atau Kerajaan Mojopahit, berada di Ujung Galuh, Cangu dan kambang Putih (Tuban). Setelah itu tumbuh pelabuhan Sedayu Lawas dan Gujaratan (Gresik), merupakan daerah amat ramai sebagai penyambung hubungan dengan Kerajaan luar Jawa bahkan luar Negeri.

Zaman Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, Di Lamongan berkembang Kerajaan kecil Malawapati (kini dusun Melawan desa Kedung Wangi kecamatan Sambeng) dipimpin Raja Agung Angling darma dibantu Patih Sakti Batik Maadrim termasuk kawasan Bojonegoro kuno. Saat ini masih tersimpan dengan baik, Sumping dan Baju Anglingdarma didusun tersebut. Di sebelah barat berdiri Kerajaan Rajekwesi di dekat kota Bojonegoro sekarang.

Pada waktu Kerajaan Majapahit dipimpin Raja Hayam Wuruk (1350 -1389) kawasan kanan kiri Bengawan Solo menjadi daerah

Pardikan. Merupakan daerah penyangga ekonomi Mojopahit dan jalan menuju pelabuhan Kambang Putih. Wilayah ini disebut Daerah Swatantra Pamotan dibawah kendali Bhre Pamotan atau Sri Baduga Bhrameswara paman Raja Hayam Wuruk (Petilasan desa Pamotan kecamatan Sambeng), sebelumnya. Di bawah kendali Bhre Wengker (Ponorogo). Daerah swatantra Pamotan meliputi 3 kawasan pemerintahan Akuwu , meliputi Daerah Biluluk (Bluluk) Daerah Tenggulunan (Tenggulun Solokuro) , dan daerah Pepadhangan (Padangan Bojonegoro).

Menurut buku Negara Kertagama telah berdiri pusat pengkaderan para cantrik yang mondok di Wonosrama Budha Syiwa bertempat di Balwa (desa Blawi Karangbinangun) , di Pacira (Sendang Duwur Paciran), di Klupang (Lopang Kembangbahu) dan di Luwansa (desa Lawak Ngimbang). Desa Babat kecamatan Babat ditengarai terjadi perang Bubat, sebab saat itu babat salah satu tempat penyeberangan diantar 42 tempat sepanjang aliran bengawan Solo. Berita ini terdapat dalam Prasasti Biluluk yang tersimpan di Musium Gajah Jakarta, berupa lempengan tembaga serta 39 gurit di Lamongan yang tersebar di Pegunungan Kendeng bagian Timur dan beberapa tempat lainnya.

Menjelang keruntuhan Mojopahit tahun 1478M, Lamongan saat itu dibawah kekuasaan Keerajaan Sengguruh (Singosari) bergantian dengan Kerajaan Kertosono (Nganjuk) dikenal dengan

kawasan Gunung Kendeng Wetan diperintah oleh Demung, bertempat disekitar Candi Budha Syiwa di Mantup. Setelah itu diperintah Rakrian Rangga samapi 1542M (petilasan di Mushalla KH.M.Mastoer Asnawi kranggan kota Lamongan). Kekuasaan Mojopahit di bawah kendali Ario Jimbun (Ariajaya) anak Prabu Brawijaya V di Galgahwangi yang berganti Demak Bintoro bergelar Sultan Alam Akbar Al Fatah (Raden Patah) 1500 sampai 1518, lalu diganti anaknya, Adipati Unus 1518 sampai 1521 M , Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 M.

Dalam mengembangkan ambisinya, sultan Trenggono mengutus Sunan Gunung Jati (Fatahilah) ke wilayah barat untuk menaklukkan Banten, Jayakarta, danCirebon. Ke timur langsung dipimpin Sultan sendiri menyerbu Lasem, Tuban dan Surabaya sebelum menyerang Kerajaan Blambangan (Panarukan). Pada saat menaklukkan Surabaya dan sekitarnya, pemerintahan Rakkryan Rangga Kali Segunting (Lamong), ditaklukkan sendiri oleh Sultan Trenggono 1541 . Namun tahun 1542 terjadi pertempuran hebat antara pasukan Rakkryan Kali Segunting dibantu Kerajaan sengguruh (Singosari) dan Kerajaan Kertosono Nganjuk dibawah pimpinan Ki Ageng Angsa dan Ki Ageng Panuluh, mampu ditaklukkan pasukan Kesultanan Demak dipimpin Raden Abu Amin, Panji Laras, Panji Liris. Pertempuran sengit terjadi didaerah Bandung, Kalibumbung, Tambakboyo dan sekitarnya.

Tahun 1543M, dimulailah Pemerintahan Islam yang direstui Sunan Giri III, oleh Sultan Trenggono ditunjuklah R.Abu Amin untuk memimpin Karanggan Kali Segunting, yang wilayahnya diapit kali Lamong dan kali Solo. Wilayah utara kali Solo menjadi wilayah Tuban, perdikan Drajat, Sidayu, sedang wilayah selatan kali Lamong masih menjadi wilayah Japanan dan Jombang. Tahun 1556 M R.Abu Amin wafat digantikan oleh R.Hadi yang masih paman Sunan Giri III sebagai Rangga Hadi 1556 -1569M Tepat hari Kamis pahing 10 Dzulhijjah 976H atau bertepatan 26 mei 1569M, Rangga Hadi dilantik menjadi Tumenggung Lamong bergelar Tumenggung Surajaya (Soerodjojo) hingga tahun 1607 dan dimakamkan di Kelurahan Tumenggungan kecamatan Lamongan dikenal dengan Makam Mbah Lamong. Tanggal tersebut dipakai sebagai Hari Jadi Lamongan.

Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, daerah Lamongan menjadi daerah garis depan melawan tentara pendudukan Belanda, perencanaan serangan 10 Nopember Surabaya juga dilakukan Bung Tomo dengan mengunjungi dulu Kyai Lamongan dengan pekikan khas pembakar semangat Allahu Akbar. Lamongan yang dulunya daerah miskin dan langganan banjir, berangsur-angsur bangkit menjadi daerah makmur dan menjadi rujukan daerah lain dalam pengentasan banjir. Dulu ada pameo “Wong Lamongan nek rendeng gak iso ndodok, nek ketigo gak iso cewok” tapi kini diatasi

dengan semboyan dari Sunan Drajat, Derajate para Sunan dan Kyai “Memayu Raharjaning Praja” yang benar benar dilakukan dengan perubahan mendasar, dalam memsejahterahkan rakyatnya masih memegang budaya kebersamaan saling membantu sesuai pesan kanjeng Sunan Drajat “Menehono mangan marang wong kangluwe, menehono paying marang wong kang kudanan , menehono teken marang wong kang wutho, menehono busaono marang wong kang wudho”

b. Arti Lambang Kabupaten Lamongan

Gambar 4.1
Lambang Kabupaten Lamongan



Sumber : Dokumentasi Kabupaten Lamongan
Makna lambang Daerah :

- 1) Bentuk segilima sama sisi pada lambang Kabupaten Lamongan tersebut dan gambar Undak bertingkat lima melambangkan DASAR NEGARA PANCASILA.
- 2) Bintang bersudut lima memancarkan sinar kearah penjuru melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- 3) Keris yang melambangkan kewaspadaan dan bahwa Kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang.
- 4) Bukit atau gunung yang tidak berapi melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki pula daerah pengunungan yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang penting untuk pembangunan.
- 5) Ikan lele melambangkan sikap hidup yang ulet tahan menderita, sabar tetapi ulet, bila di ganggu ia berani menyerang dengan senjata patilnya yang ampuh.
- 6) Ikan bandeng melambangkan Potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan.
- 7) Air beriak di dalam tempayan melambangkan bahwa air selalu menjadi masalah di daerah ini, dimusim hujan terlalu banyak air dimusim kemarau kekurangan.
- 8) Tempayan batu melambangkan Tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapapun yang memerlukan dan bahwa Daerah Lamongan memiliki latar belakang sejarah yang panjang.
- 9) Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan pangan, sandang dan lainnya.

c. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Visi :

“Mewujudkan Lamongan sebagai Kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing”

Misi :

- 1) Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- 2) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah.
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
- 4) Mewujudkan Lamongan yang *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan 10 (sepuluh) prinsipnya, yaitu; a. Prinsip Partisipasi; b. Penegakan Hukum atau supremasi hukum; c. Transparansi; d. Kesetaran; e. Wawasan kedepan; f. Akuntabilitas; g. Pengawasan; h. Efisiensi; i. Efektivitas; dan, j. Profesionalisme aparatur.
- 5) Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.

- 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal.

d. Kondisi Demografis Kabupaten Lamongan

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2017

Umur	Laki – Laki	Perempuan	Total
0-14	170.087 jiwa (27,65%)	151.617 jiwa (23,44%)	321.704 jiwa
15-64	407.040 jiwa (66,17%)	436.092 jiwa (67,42%)	843.132 jiwa
65+	38.015 jiwa (6,18%)	59.121 jiwa (9,14%)	97.136 jiwa
Total	615.142 jiwa	646.830 jiwa	1.261.972 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2017, Laki-laki umur 0-14 tahun sampai 65+ tahun sebanyak 615.142 jiwa, Perempuan umur 0-14 tahun sampai 65+ tahun sebanyak 646.830 jiwa, jadi total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten lamongan sebanyak 1.261.972 jiwa.

Secara administratif Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 kecamatan, meliputi 462 desa dan 12 kelurahan yang terbagi dalam 1.486 dusun dan 309.976 RT, dengan jumlah penduduk tahun 2012, mencapai 1.284.379 jiwa yang terdiri dari 643.532 jiwa laki-laki dan 640.874 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, pedagang, nelayan,

dan jasa. Selama 2 tahun terakhir (2015-2016), laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar minus 0,17% dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk 709 orang per km².

Masyarakat Lamongan adalah masyarakat yang religius. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendorong terciptanya pembangunan masyarakat seutuhnya. Wujud dari dorongan pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut adalah dengan pendirian tempat-tempat ibadah, banyaknya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lamongan serta banyaknya kegiatan agama-agama yang berlangsung.

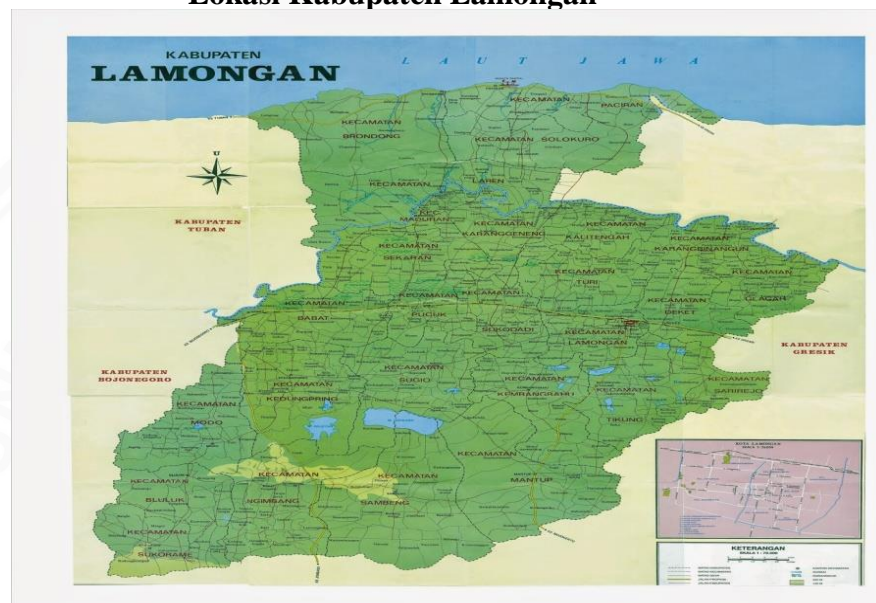
Sumberdaya manusia Kabupaten Lamongan berdasarkan mata pencaharian masih unggul di sektor pertanian, sekitar 55,84 persen penduduk Kabupaten Lamongan bekerja di sektor pertanian, kemudian di sektor perdagangan sebesar 18,01 persen, di sektor jasa sebesar 10,35 persen, sektor industri 9,49 persen, sisanya di sektor pertambangan, gas, listrik dan air bersih, konstruksi, keuangan, transportasi dan komunikasi.

Melihat perkembangan Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang menunjukkan sektor industri akan semakin meningkat, hal ini akan mempengaruhi sistem mata pencaharian masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian untuk pengembangan kawasan industri akan mengakibatkan terjadinya peralihan mata pencaharian dari petani menjadi pekerja industri. Untuk mengantisipasi hal

tersebut diperlukan adanya pelatihan di bidang industri agar masyarakat dapat memperdalam pengetahuan tentang potensi besar yang dapat dialihkan oleh industri.

e. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Gambar 4.2
Lokasi Kabupaten Lamongan



Sumber : loketpeta.go.id

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6 51' 54" sampai dengan 7 23' 6" lintang selatan dan antara 112 4' 41" sampai dengan 112 33' 12" bujur timur, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km² atau setara dengan 181.280 ha., terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 0-25m seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan,

daratan ketinggian 25-100m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian diatas 100m.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik, yaitu:

- 1) Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- 2) Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- 3) Bagian tengah utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik daerah yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 4 Sub Satuan wilayah Pembangunan yaitu :

- a) Sub Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Lamongan meliputi Kecamatan Turi, Sukodadi, Kalitengah, Karanggeneng, Tikung, Kembangbahu, Mantup dan Sugio. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain : perdagangan, industri, usaha pertanian dan perkebunan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan jasa serta pariwisata.
- b) Sub Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Babat meliputi Kecamatan Sekaran, Pucuk, Kedungpring, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, dan Sambeng. Kegiatan yang dikembangkan di

wilayah ini antara lain: perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan.

- c) Sub Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Brondong yang meliputi Kecamatan Paciran, Solokuro, dan Laren. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: intensifikasi produksi perikanan laut, garam rakyat, tambak udang, argoindustri, perkebunan dan pariwisata.
- d) Sub Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Deket yang meliputi Kecamatan Glagah dan Karangbinangun. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: pertanian dan perikanan.

f. Potensi Ekonomi Kabupaten Lamongan

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Hasil analisis komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur (38 kabupaten/kota) dengan menggunakan 2(dua) indikator utama yaitu statis location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain :

- 1) Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
- 2) Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
- 3) Sektor bangunan / kontruksi,
- 4) Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
- 5) Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta
- 6) Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

Selain berdasarkan hasil analisis diatas, potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor

perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 hektare(sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG (7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-2 di Jawa Timur). Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur.

Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai kurang lebih Rp.446 milyar. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut. Perikana sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 hektare mampu memberikan produksi ikan air tawar sebesar di Jawa Timur, sedangkan perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo.

Sedangkakan pada sektor indusri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM)

yang ada. Berdasarkan data tahun 2006, di Kabupaten Lamongan berkembang 13.676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang kesemuanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Sektor bangunan /kontruksi merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju gerak pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa gedung, jalan jembatan, sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (ASDP), obyek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang didukung peranan swasta/ investor.

Besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri hasil produk lamongan merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada

tahun 2006 memberikan perumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,37%.

Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/significant untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perokonomian daerah Kabupaten Lamongan. Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi / ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplier effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2006 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

Melalui pemikiran yang berwawasan luas (regional dan nasional) yang didukung dengan pemahaman bahwa potensi ekonomi daerah bukanlah sekedar apa yang terkandung dan tersedia di daerah tersebut, tetapi juga meliputi potensi ekonomi di luar teritori Wilayah Lamongan yang dapat mendatangkan manfaat bagi Lamongan. Melalui riset peta potensi unggulan daerah baik yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal-luar daerah, propinsi

bahkan nasional disertai dengan strategi pemasaran daerah, Kab.Lamongan memanfaatkan peluang dan potensi tersebut demi terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat Lamongan. Wilayah Kab.Lamongan yang mempunyai letak strategis di antara pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah. Model pembangunan ekonomi daerah dengan pendekatan kutub pertumbuhan (Growth Pole Approach), yaitu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*) khususnya di wilayah pantura dengan pihak investor merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini. Diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut bisa menjadi engine of growth dari perekonomian Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan wilayah lainnya.

g. Sosial Budaya Kabupaten Lamongan

Lamongan merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Kota Lamongan juga terkenal banyak budayanya diantaranya yaitu Tari Boran, Tari Mayang Madu, Tari Turonggo Solah, Tari Caping Ngancak, Tari Silir-Silir dan Tari Sinau. Dari berbagai tarian tersebut, tarian yang menjadi khas budaya dan berkembang di kota Lamongan adalah Tari Mayang Madu. Tari Mayang Madu ini menceritakan tentang perjalanan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah kota Lamongan

yaitu Sunan Drajat. Penyebarannya melalui kesenian, salah satunya dengan musik. Musik yang dipakai adalah Singo Mengkok. Tari mayang Madu berasal dari daerah Lamongan. Tari ini biasa ditampilkan dalam bentuk tari tunggal, tari kelompok, maupun tari massal.

Selain Tari Mayang Madu, di kota Lamongan juga terkenal dengan Tari Boran. Tari Boran (Sego Boran) adalah penggambaran suasana kehidupan para penjual Nasi Boran di Kabupaten Lamongan dalam menjajakan dagangannya dan berinteraksi dengan pembeli. Kesabaran, gairah, dan semangat serta ketangguhan adalah semangat mereka dalam menghadapi ketatnya persaingan dan beratnya tantangan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Iwak kutuk, sambel, sili, plethuk, peyek, gimbal, empuk adalah ciri khasku, Nasi Boran khas Lamongan. Terdapat Tari Caping Ngancak di daerah Lamongan yang juga terus berkembang karena letak dari wilayah Lamongan juga sangat agraris. Tari Caping Ngancak menceritakan tentang kehidupan masyarakat Lamongan yang sebagian besar adalah masyarakat petani. Tari ini menggambarkan proses para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen.

Daerah lamongan memiliki tradisi sendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan, pernikahan di Lamongan ini disebut pengantin bekasri. berasal dari kata bek dan asri, bek berarti

penyuh, asri berarti indah atau menarik jadi bekasri berarti penyuh dengan keindahan yang menarik hati. pada dasarnya tahapan dalam pengantin bekasri dapat dijadikan dalam empat tahap yaitu tahap mencari mantu, tahap persiapan menjelang peresmian pernikahan, tahap pelaksanaan peresmian pernikahan dan tahap setelah pelaksanaan pernikahan. Tahap mencari mantu terdiri dari beberapa kegiatan yaitu, ndelok/nontok atau madik/golek lancu, nyotok/ganjur atau nembung gunem. nothog/dinten atau negesi, ningseti/lamaran, mbales/totogan, mboyongi, ngethek dina. Tahap persiapan menjelang peresmian pernikahan yaitu repotan, mbukak gedhek atau mendirikan terop, ngaturi atau selamatan. Tahapan pelaksanaan peresmian pernikahan terdiri dari, ijab kabul atau akad nikah, memberikan tata rias atau busana pengantin, upacara temu pengantin, resepsi. Tahapan setelah peresmian pernikahan yang merupakan tahapan terakhir adalah sepasaran.

Semua kegiatan masing-masing tahapan ini dapat dilaksanakan secara penyuh tetapi juga dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan disesuaikan dengan situasi kondisi lokal setempat. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, kedua pengantin merupakan pusat perhatian semua tamu yang hadir, pengantin perlu dirias dan diberi busana yang lain dari busana sehari-hari. tata rias dan busana pengantin bekasri memiliki keunikan tersendiri yang pada dasarnya meniru busana raja dan permaisuri

atau busana bangsawan. Karena daerah Lamongan pada jaman kerajaan Majapahit merupakan wilayah yang dekat dengan ibukota Majapahit, maka busana yang ditiru dengan sendirinya adalah busana raja dan permaisuri Majapahit.

Tradisi di lamongan yaitu ketika ada pernikahan si perempuan yang harus melamar atau meminang si laki-laki dahulu. Tradisi sedekah bumi atau bersih desa yaitu sebuah upacara yang digunakan untuk membersihkan desa agar terhindar dari segala musibah. Dialek dan arti bahasa orang Lamongan adalah bahasa pesisir yang lugas penuh dialek Osing, Madura, Jawa Ngoko, diwarnai budaya Arek atau Bocah. Beberapa kata-kata yang sering digunakan di daerah lamongan yaitu Menyok artinya Pohong atau ubi jalar, Bolet artinya telo atau ketela, Parek artinya cedak atau dekat

Kota Lamongan juga memiliki berbagai ritual, diantaranya adalah ritual meminta kesuburan hasil pertaniannya. bangunan candi di Desa Siser, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur lebih mengarah pada tempat pemujaan untuk meminta kesuburan. Hal itu biasanya ditandai dengan adanya lingga yoni di sekitar tempat tersebut, atau ada kaitannya dengan prasasi yang telah ditemukan sebelumnya. Serupa dengan situs purbakala lain di tanah air, dimana ditemukan artefak yang di dalamnya terdapat lingga yoni, selalu diikuti dengan suburnya lahan pertanian di sekitarnya.

Hal ini cukup menguatkan karena Desa Siser, dan desa-desa sekitarnya merupakan area pertanian subur yang dekat dengan sungai Bengawan Solo. Sesuai prasasti Canggu, di era Majapahit di daerah tersebut ada Naditira Pradesa . Maksudnya desa yang diberi otonomi dan bebas dari pajak. Warga dari desa potensial untuk pertanian ini memiliki hak dan kewajiban mengelola penyeberangan sungai. Bisa jadi karena berdekatan dengan Bengawan Solo, sehingga warga dari seberang akan naik perahu menuju candi untuk ritual pemujaan meminta kesuburan.

Selain ritual tersebut, di kota Lamongan juga terdapat ritual yaitu Upacara Ruwatan Ontang-Anting dan Wiwit. Upacara Ruwatan Ontang-Anting, Upacara ini bermula dari sesepuh/tokoh masyarakat yang masih mewarisi budaya nenek moyang tersebut, selalu memberi nasehat kepada sanak-saudaranya yang mempunyai anak yang harus diruwat. Apabila anak tersebut menjelang akil balig, sebelum dinikahkan dan tidak mempunyai saudara atau anak tunggal baik pria atau wanita, dua anak putra atau dua anak putri harus segera dilaksanakan upacara ruwatan. Caranya orang tua minta tolong kepada dalang untuk melaksanakan ruwatan. Sebelum dilakukan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Ontang-Anting Bathara Kala, dalang mengupas kupat luwar dihadapan anak-anak yang akan diruwat. Wiwit yaitu sebuah upacara atau ritual yang dilakukan pada saat akan panen atau musim panen.

h. Potensi Bencana Kabupaten Lamongan

Rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah bencana banjir dan bencana gelombang pasang.

1) Potensi

- a) Kawasan rawan Banjir di Kabupaten Lamongan berda di kawsan yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah, Karangbinangun, Turi dan Deket.
- b) Pengelolaan kawasan yang terkena banjir dapat diantisipasi dengan melakukan reboisasi pada sepanjang airan sungai Bengawan Solo.
- c) Potensi kawasan bencana lainnya dapat terjadi di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong yang merupakan kawasan pesisir.

2) Masalah

- a) Bencana Banjir di sekitar sungai Bengawan Solo diakibatkan oleh terdapatnya penggunaan lahan pada kawasan konsevasi yaitu ditepi sungai.
- b) Tidak terdapatnya penghijauan di sepanjang tepi sungai.
- c) Tingginya tingkat pengembangan wilayah di kawasan pesisir sehingga mengalami benturan dengan kelestarian lingkungan.

- d) Mulai hilangnya kawasan hutan mangrove dan rusaknya terumbu karang.
- e) Potensi yang besar di kawasan pesisir sehingga mendorong pengembangan kawasan budidaya yang membutuhkan lahan pengembangan yang luas sehingga banyak lahan konservasi yang terpakai. Hal ini memungkinkan terjadinya pasang jika tidak ada penanggulangan dini.

3) Cara penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan

Beberapa kawasan di Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan banjir terutama pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Begawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun. Selain dikawasan tersebut kawasan lainnya yang termasuk dalam rawan bencana banjir antara lain Kecamatan Deket dan Turi. Luas seluruh kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lamongan mencapai ± 29.273 Ha atau sekitar 16,15 % dari luas wilayah Kabupaten Lamongan. Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan hijau di sekitar daerah sungai, dan banyak terdapat kawasan budidaya di sekitar kawasan konservasi.

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah :

- a) Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas melalui Pengelolaan DAS Bengawan Solo.
- b) Pengelolaan irigasi yang tersistem dengan memanfaatkan DAS Bengawan Solo.
- c) Melakukan penghijauan pada sepanjang sempadan aliran sungai.
- d) Melakukan perlindungan hutan pada kawasan sekitar sungai.
- e) Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir.
- f) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.
- g) Melakukan koordinasi dalam hal pengeloaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.
- h) Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun.

selain rawan bencana banjir di Kabupaten Lamongan juga rawan dengan bencana gelombang pasang, perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu di pesisir Brondong dan

Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan sejak dini.

Adapun upaya penanggulangan untuk mengantisipasi kemungkinan rawan gelombang pasang, sebagai berikut:

gelombang pasang perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu di pesisir Brondong dan Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan sejak dini.

Adapun upaya penanggulangan untuk mengantisipasi kemungkinan rawan gelombang pasang, sebagai berikut:

- a) Pembangunan jetty/penahan gelombang untuk memecahkan gelombang pasang.
- b) Perlindungan terhadap terumbu karang untuk kelestarian biota laut.
- c) Mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai

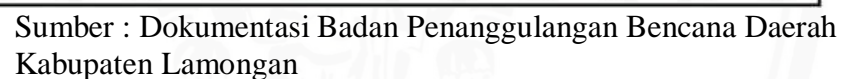
meliputi mangrove, terumbu karang, dan vegetasi untuk mencegah gelombang pasang.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

a. Dasar Pembentukan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah adalah bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan itu Daerah Kabupaten Lamongan yang memiliki kondisi Geografis, Geologis, Hidrologis dan Demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor sosial yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan secara umum di Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi wilayah dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan



- 1) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana,
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana,

- 3) Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa.
- 4) Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung para peningkatan sistem logistik dan peralatan.
- 5) Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

c. Sasaran

- 1) Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana.
- 2) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai.
- 3) Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana.
- 4) Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

- 5) Terwujudnya upaya rehabilitasi yang telah baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.

d. Visi

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kabupaten Lamongan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, Maka BPBD Kabupaten Lamongan menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Ketangguhan dan Kebersamaan Masyarakat Lamongan Dalam Menghadapi Bencana”

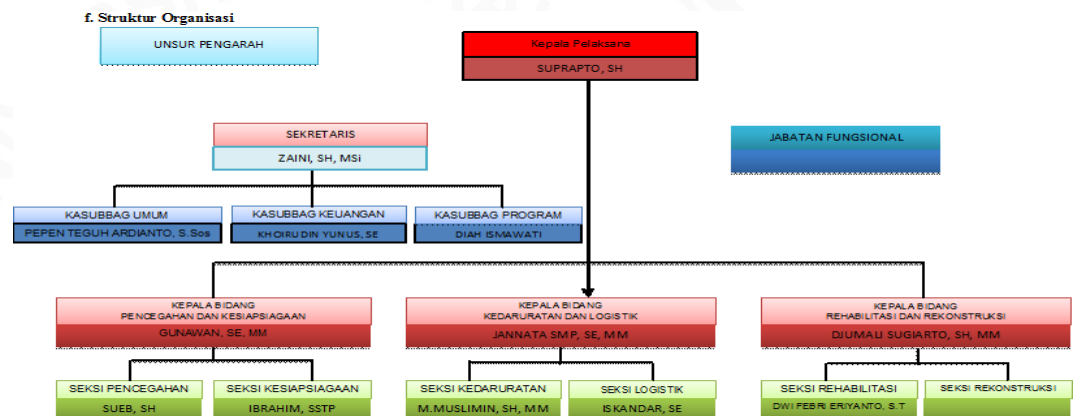
Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk menghadapi bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (multi stakeholder), Institusi vertikal maupun horisontal dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Bencana serta terencana, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh.

e. Misi

Untuk mendukung dan mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mengembangkan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamongan.
- 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan Bencana.
- 3) Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang diakibatkan terjadinya bencana.

f. Struktur Organisasi



3. Gambaran Umum Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Babat merupakan nama salah satu kelurahan di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang merupakan kelurahan terparah ketika terjadi bencana banjir. Kelurahan Babat terdiri dari 45 RT dan 13 RW. Adapun batas wilayah Kelurahan Babat adalah sebagai berikut- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pucangwangi Kecamatan Babat- Sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedahan Kecamatan Babat.

a. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yaitu 14.611 jiwa, laki-laki 7.262 jiwa, perempuan 7.349 jiwa, dan terdiri dari 4.154 kepala keluarga dan seluruh penduduk Kelurahan Babat beragama Islam.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Kelurahan Babat tergolong masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti masyarakat Kelurahan Babat tersebut. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pekerja disektor jasa/perdagangan. Berikut tabel selengkapnya :

Tabel 4.2
Pekerja masyarakat Kelurahan Babat Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pekerja di sektor jasa/perdagangan	8.766 orang
2	Pekerja di sektor industri	4.383 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.462 orang
Jumlah		14.611 orang

Sumber : Daftar Isian Data Dasar Profil Kelurahan Babat Kecamatan

Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, 2018

Dilihat dari tabel diatas, pekerja mayoritas masyarakat Kelurahan Babat adalah pekerja di sektor jasa/perdagangan dengan jumlah 8.766 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai pekerja di

sektor industri diurutan kedua dengan jumlah 4.383 orang dengan disusul dengan pegawai negeri sipil dengan jumlah 1.462 orang.

c. Kondisi Sosial Pendidikan

Di Kelurahan Babat kondisi pendidikannya bisa dibilang masih minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ketingkat sekolah yang lebih tinggi. Terbukti dengan data yang penulis peroleh dari kepala desa Kelurahan Babat tersebut, banyak dari penduduk Kelurahan Babat yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar (SD), bahkan masih terdapat beberapa penduduk yang buta huruf. Berikut tabel selengkapnya :

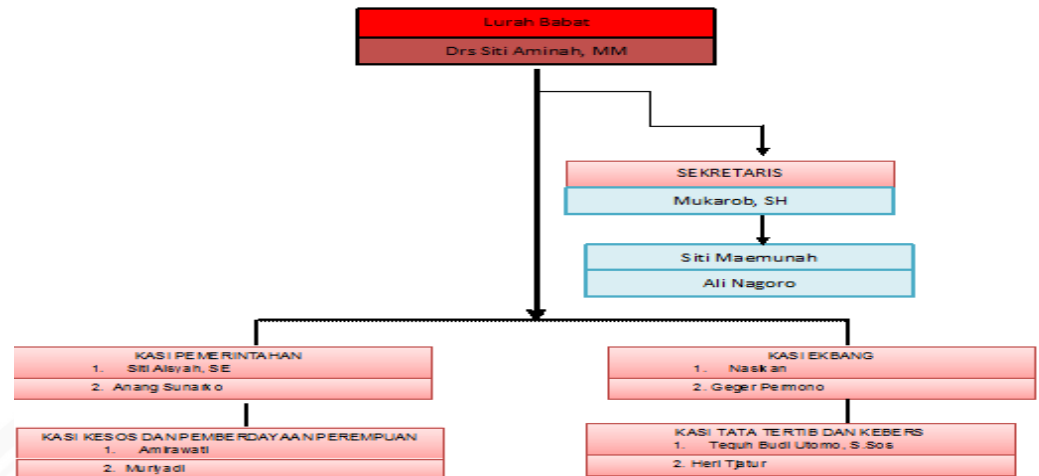
Tabel 4.3
Pendidikan Masyarakat Kelurahan Babat Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	-
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	122
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	957
4	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	872
5	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	1.505

Sumber : Daftar Isian Data Dasar Profil Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, 2018

Dilihat dari tabel diatas, jumlah pendidikan masyarakat Kelurahan Babat tahun 2018, penduduk tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 122 orang, penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 957 orang, penduduk tamat SLTP/ sederajat sebanyak 872 orang, dan penduduk tamat SLTA/ sederajat sebanyak 1.505 orang.

d. Struktur Organisasi



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kelurahan Babat Tahun 2018

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Babat, 2018

B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian

1. Mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan :

a. Program Mitigasi

Program mitigasi penanggulangan banjir yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan adalah Rencana Aksi Komunitas (RAK) Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Babat (FPRB). Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Babat (FPRB) merupakan salah satu program mitigasi bencana yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRPB) yaitu

untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam mengantisipasi bencana dan menghadapi bencana serta dapat memulihkan diri dari bencana. Program ini berisi tentang penyuluhan dan sosialisasi, kegiatan-kegiatan maupun pelatihan lapangan penanggulangan bencana yang membangun kesadaran masyarakat dalam bahaya dan resiko bencana. Sosialisasi dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Ibu Siti Aminah Selaku Lurah Kelurahan Babat :

“... Dengan adanya program mitigasi yang di bentuk oleh BPBD Kabupaten Lamongan di Kelurahan Babat yang bernama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) itu tentang pelatihan-pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana. Pembentukan FPRB ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang tanggap terhadap bencana. Jadi setiap bencana datang masyarakat bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan, tidak hanya menunggu didalam rumah menunggu pertolongan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Forum Pengurangan Risiko Bencana...” (Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Babat, Ibu Siti Aminah 03 Maret 2018 pukul 10.30 WIB).

Dalam mensukseskan program BPBD maka dilakukan kegiatan-kegiatan guna mempersiapkan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Kegiatan yang dilakukan berupa Sosialisasi, Simulasi dan Latihan Lapangan, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan bencana agar siap menghadapi bencana yang akan terjadi, dan kegiatan ini juga ditujukan untuk masyarakat yang tidak berada pada kawasan bencana agar peduli terhadap lingkungannya.

Kegiatan sosialisasi, simulasi dan latihan di bagi menjadi tiga jenis, yaitu pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana. Berikut beberapa foto sosialisasi, simulasi dan pelatihan lapangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan di Kelurahan Babat.

b. Pra Bencana

Gambar 4.5.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat Tahun 2017



Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan

Kegiatan ini merupakan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana yang berada di Kelurahan Babat. Kegiatan ini berisi tentang penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di kawasan bencana, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah apa saja dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Tujuan terbentuknya Desa

Tangguh bencana ini untuk memperoleh lebih banyak lagi relawan-relawan dari masyarakat sendiri untuk membantu pada saat penanggulangan bencana secara cepat dan tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kabupaten Lamongan :

“Pengadaan desa tangguh bencana merupakan program yang baru terealisasi, yang kita harapkan dari desa tangguh ini yakni lemahnya kita dalam kecepatan mengjangkau daerah dan mengetahui kondisi wilayah yang terjadi bencana. Dalam program ini masyarakat bisa dengan cepat dan sigap melakukan upaya penyelamatan antar warga dan harta benda mereka tanpa menunggu bantuan dari kami. Karena masyarakat setempatlah yang mengetahui kondisi wilayahnya sehingga resiko bencana bisa diminimalisir”(Hasil wawancara 04 maret 2018 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dari Ibu Siti Aminah dan Bapak Gunawan dapat disimpulkan, dengan adanya program mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat diharapkan masyarakat dapat belajar sekaligus berlatih melakukan mitigasi yang berencana. Dengan demikian ketika pada saat terjadi bencana masyarakat dapat aktif melakukan upaya penyelamatan bukan hanya pasif menunggu bantuan atau pertolongan datang.

c. Aktor yang terlibat dalam mitigasi penanggulangan banjir

Pelaksanaan penanggulangan terutama dalam mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zaini selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan :

“terdapat tiga pelaku penanggulangan bencana, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29” (Hasil wawancara 16 Maret 2018 Pukul 09.30 WIB).

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan, setiap pelaku pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing *stakeholders*. Berikut penjelasan tugas masing-masing pelaku pelaksana penanggulangan bencana yang sudah tertulis jelas pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang penanggulangan bencana.

1) Peran dari masing-masing aktor dalam mitigasi penanggulangan banjir

a) Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Salah satu tugas BNPB dalam penanggulangan bencana yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dan menyusun, menetapkan, serta

menginformasikan peta rawan bencana. Bapak Zaini selaku

Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa :

“...Sudah menjadi tanggungjawab kami selaku pegawai pemerintah untuk mencegah terjadinya bencana, meskipun begitu kami tidak bisa berbuat banyak jika masyarakat tidak ikut serta dalam upaya pencegahan bencana tersebut. Kami selalu berupaya sebaik mungkin agar bencana itu tidak terjadi (Hasil wawancara 19 Februari 2018 Pukul 13.15 WIB)

Gambar 4.6
Peran Pemerintah dalam penanggulangan Bencana



Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

b) Peran Masyarakat

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak ada definisi khusus tentang masyarakat, tetapi di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ada hak dan kewajiban masyarakat, antara lain setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan setiap orang mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan,

keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Ridwan selaku masyarakat Kelurahan Babat :

“Desa kami merupakan salah satu Desa Tangguh Bencana yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Lamongan. Awalnya butuh memberikan pengertian khusus kepada warga-warga disini untuk ikut andil karena pengetahuan warga disini tentang bencana masih kurang. Saya secara terus menerus mengajak warga untuk ikut dalam setiap pertemuan yang diadakan BPBD, sampai akhirnya warga mau terlibat setelah bapak-bapak dari BPBD menjelaskan maksud dan tujuannya. Ya alhamdulillah, masyarakat di Kelurahan Babat sering melakukan pertemuan dan pelatihan rutin dengan BPBD. Dari situ, sekarang warga sudah tahu apa saja yang harus dilakukan jika banjir akan datang. Contohnya menyiapkan karung pasir di titik-titik rawan banjir. Rumah warga disini kebanyakan sudah ditinggikan, untuk antisipasi kalau-kalau ada banjir. Sebelumnya warga kalau ada banjir diam terperangkap dirumahnya, sekarang sudah dapat menyelamatkan keluarga, harta dan bendanya sendiri. Warga juga sudah menentukan pos-pos pengungsian, dapur umum, dan pos kesehatan” (Hasil wawancara 19 Februari 2018 Pukul 09.30 WIB).

Gambar 4.7

Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana



Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

c) Peran Lembaga Usaha

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Dalam aktivitasnya lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaga usaha juga berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah atau badan serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. Selain itu juga lembaga usaha berkewajiban menyesuaikan program kerjanya yang berbasis lingkungan yang merupakan bentuk penanggulangan bencana dalam lembaga usaha.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku aktor pelaksana penanggulangan bencana ditingkat Pemerintah, berperan sering dalam tahap pelaksanaan, pengawasan maupun koordinator semua pihak. Bapak Zaini selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan mengemukakan bahwa :

“...dalam penanggulangan bencana, semua pegawai BPBD menjadi pelaksana aktif di lapangan pada saat prabencana, terjadi bencana maupun pasca bencana. Kita selalu menjadi aktor yang tidak boleh absen, sekalipun masyarakat sekarang sudah bisa mengendalikan bencana pada daerahnya. Tetap kita meninjau, memantau dan membantu masyarakat yang terdampak” (Hasil wawancara 19 Februari 2018 Pukul 13.15 WIB).

Peran masyarakat sendiri dalam penanggulangan bencana tidak kalah pentingnya. Masyarakat terdampak

setelah mendapatkan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan oleh BPBD juga mampu dalam melakukan penanggulangan secara mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Babat yakni Ibu Siti Aminah, yang daerahnya merupakan salah satu contoh program mitigasi oleh BPBD yaitu Desa Tangguh Bencana yang sudah berjalan di Kabupaten Lamongan :

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjadi tanggungjawab utama. Bencana merupakan masalah yang rumit yang berdampak besar bagi kita semua. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita untuk bersama-sama menghadapi risiko bencana agar tidak lagi banyak jatuh korban maupun kerugian materiil. Dibutuhkan tindakan yang padu antar aktor-aktor dalam melakukan penanggulangan bencana.

2) Hubungan atau Koordinasi Terhadap Mitigasi Penanggulangan Banjir

Hubungan atau koordinasi dalam mitigasi bencana banjir antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi terkait dan juga adanya kerjasama yang baik antara masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana. Hal ini didukung

oleh pernyataan Bapak Sueb selaku staf pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan yang mengatakan bahwa :

“ dalam mitigasi bencana banjir kita memperoleh banyak dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat setempat diajak bergotong-royong melakukan kegiatan kebersihan dan juga saat ada pelatihan kebencanaan masyarakat juga ikut dalam kegiatan tersebut. Koordinasi yang mudah antar instansi dapat dilihat dari ketanggapan dari badan instansi lain dalam membantu kegiatan kegiatan penanggulangan bencana” (Hasil wawancara 03 Maret 2018 pukul 13.30 WIB).

Pernyataan diatas dipertegas lagi oleh Bapak Zaini selaku sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan mengenai dukungan instansi-instansi Pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir, berikut pernyataannya :

“...jika kita kekurangan sarana dan prasana untuk mengevakuasi maupun untuk memantau daerah yang terjadi bencana, kita biasanya meminjam dari dinas-dinas terkait, dan mereka dengan tanggap dan sukarela memberikan pinjaman sarana dan peralatan yang kita butuhkan. Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan atau prasarana pendukung. Diluar BPBD Kabupaten Lamongan yang berasal dari instansi. Contohnya, jika bencana terjadi kita biasanya bekerjasama dengan Badan SAR untuk melakukan evakuasi, melakukan kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam memberikan kebutuhan air bersih pada warga yang terkena banjir yang kesulitan mendapatkan air bersih dengan sarana truk tangki air dari BLH” (Hasil wawancara 07 Maret 2018 pukul 08.30 WIB).

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui dalam mitigasi bencana banjir adalah ketersediannya anggaran yang terperinci dan dapat mencukupi segala kebutuhan dalam kegiatan penanggulangan bencana, terutama pada saat bencana terjadi.

d. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi penanggulangan banjir

Kepedulian dan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir sangat dibutuhkan, dilihat dari faktor penyebab bencana banjir tersebut itu sendiri terdapat dua faktor yaitu dari faktor alam dan faktor manusia. Disamping faktor alam, terdapat faktor ,anusia yang mempengaruhi bencana antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, distorsi besar-besaran pada daerah hulu, pemukiman yang terletak pada daerah resapan air terdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seringkali masyarakat kehilangan nyawa dan harta benda yang dikarenakan bencana, maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana, guna pengurangan resiko bencana.hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Zaini selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan :

“ Peran masyarakat dalam mitigasi bencana terutama bencana banjir sangat dibutuhkan. Karena percuma saja kita melakukan program mitigasi ini itu tapi kalau warga acuh dan tidak mau tahu tentang mitigasi bencana, tetap saja tidak ada hasilnya” (Hasil wawancara 21 Februari 2018 pukul 09.30 WIB)

Sependapat dengan pernyataan Bapak Zaini, selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan. Pekerjaan dan program-program Pemerintah untuk meminimalisir resiko bencana yang akan terjadi dengan mitigasi bencana akan sia-sia jika partisipasi dari

masyarakat tidak ada. Masyarakat seharusnya menghargai kerja keras Pemerintah dalam hal mitigasi bencana, hanya dengan tidak membuang sampah di sungai sudah merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sangat berharga. Usaha pengendalian dan penanggulangan banjir apapun itu akan sangat berpengaruh besar terhadap fenomena bencana.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu wadah untuk memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan secara bersama. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan dalam suatu kelompok tersebut dan membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi sehingga implementasi kegiatan akan berjalan lebih efektif. Akuntabilitas Pemerintah itu sendiri dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam program-program Pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, dalam jangka panjang masyarakat bisa menanam pohon pada halaman rumah mereka dan juga melestarikan pohon-pohon yang sudah ada. Membuang sampah pada tempatnya, bisa juga mengolah sampah-sampah organik menjadi barang kerajinan. Kedua, dalam jangka pendek masyarakat bisa melakukan kerja bakti bersih-bersih lingkungan rumah tangga dan membuat saluran air pada tiap-tiap rumah. Serta gotong royong

memperbaiki jalan yang rusak. Ketiga, masyarakat dalam hal mitigasi bencana banjir juga mempunyai wewenang untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan banjir. Bapak Zaini, Selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan, menambahkan :

“kurangnya SDM dan sarana dan Prasarana kita (BPBD Kabupaten Lamongan), peran masyarakat sangatlah penting untuk membantu meringankan beban kita dalam menanggulangi bencana. Kita sangat terbantu dengan adanya relawan-relawan dari masyarakat yang membentuk LSM secara mandiri untuk penanggulangan bencana. LSM tersebut terbentuk secara mandiri, dan mempunyai anggaran sendiri, mereka akan sigap membantu jika bencana datang. Dalam pelatihan-pelatihannya kita seringkali mengundang LSM yang dibentuk oleh masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam pelatihan yang kita lakukan”(hasil wawancara 23 Februari 2018 pukul 10.00 WIB).

Sikap pasif masyarakat dalam penanggulangan serta pencegahan banjir dengan segala resiko bencananya harus segera diakhiri. Masyarakat harus mulai mempunyai inisiatif dan lebih mandiri dalam hal pencegahan serta penanggulangan dampak banjir. Hal tersebut akan mempunyai dampak positif baik bagi masyarakat sendiri maupun bagi pemerintah. Bagi masyarakat, sikap kemandirian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak banjir akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pemerintah kemandirian tersebut bisa mengurangi pengeluaran anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah.

e. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi penanggulangan banjir

Dukungan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan adalah mudahnya akses koordinasi dalam mitigasi bencana banjir antara masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana dan adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Zaini selaku sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan :

“adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari pos belanja tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten Lamongan juga faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya. Karena semua butuh anggaran untuk melaksanakan implementasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat”(hasil wawancara 15 Maret 2018 pukul 13.45 WIB).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan dukungan dalam mitigasi bencana banjir adalah ketersediaannya anggaran yang terperinci dan dapat mencukupi segala kebutuhan dalam kegiatan penanggulangan bencana, terutama pada saat terjadi bencana.

- 2. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kelurahan Babat Kabupaten Lamongan**
 - a. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi penanggulangan banjir**

Kebijakan yang dilakukan BPBD Sampai saat ini program dan kegiatan dalam upaya pra bencana banjir di wilayah Kabupaten Lamongan sudah mulai terlihat baik upaya mitigasi secara struktural maupun non struktural. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yakni :

“...Sampai saat ini kami (BPBD) telah berupaya sebaik mungkin, pembangunan fisik dan non fisik yang telah kami implementasikan adalah normalisasi sungai dan rawa dengan di keruk, pemasangan pompa air sedangkan yang non fisik adalah sosialisasi membentuk kesadaran masyarakat tentang membuang sampah, alih fungsi lahan. Upaya-upaya yang saya sebutkan tadi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait...” (hasil wawancara 30 Januari 2018 pukul 10.30 WIB).

Sosialisasi merupakan salah satu upaya mitigasi non-struktural yang telah dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia tersebut. Sosialisasi masyarakat maupun pihak pegawai BPBD dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu terhadap bencana, seperti yang di sampaikan bapak Sueb selaku Staf ahli pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD yang menyatakan :

“...Dalam upaya peningkatan kemampuan kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Lamongan selalu mengembangkan kapasitas pegawai maupun bencana baik dilaksanakan sendiri maupun masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan simulasi penanganan bencana baik dilaksanakan sendiri maupun dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk pengurangan resiko bencana, ESDM Provinsi Jawa Timur dalam bentuk sosialisasi mitigasi bencana yang kegiatannya dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun nasional...” (hasil wawancara 31 Januari 2018 pukul 11.30 WIB).

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Suyatno selaku masyarakat Kelurahan Babat bencana banjir yang menyatakan :

“ iya mbak, masyarakat di sini (Kelurahan Babat) sudah dibekali BPBD dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi dalam bentuk mengajari setiap masyarakat bagaimana menanggulangi bencana banjir. Masyarakat terbantu akan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat lebih mengerti apa itu bencana khususnya bencana banjir...”(hasil wawancara 02 Maret 2018 pukul 13.30 WIB).

Gambar 4.8
Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir diKelurahan Babat



Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan pernyataan Bapak Gunawan dan Bapak Suyatno di atas, BPBD dan dinas terkait telah melaksanakan program dan kegiatan baik upaya struktural maupun non struktural. Implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan berdampak positif kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD harus dimonitoring dan diawasi pelaksanaannya sampai di Kecamatan bahkan Desa. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Nurul Misbah selaku Sekretariat Camat Kecamatan Babat menjelaskan sebagai berikut :

“...Beberapa program yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan di wilayah kami, salah satunya pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Kelurahan Tangguh Bencana, normalisasi sungai, dan pemasangan pompa air untuk menyedot air dan dibuang ke bengawan solo. Sebagai koordinator di kecamatan kami memfasilitasi dan mendukung penuh upaya kegiatan BPBD untuk mengurangi banjir tersebut. Kami juga berkoordinasi dengan pihak desa maupun kelurahan supaya program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat menerima baik upaya BPBD tersebut...”(hasil wawancara 05 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).

Pendapat Bapak Nurul Misbah diperkuat dengan pendapat Ibu Siti Aminah selaku Lurah Kelurahan Babat yang menyatakan :

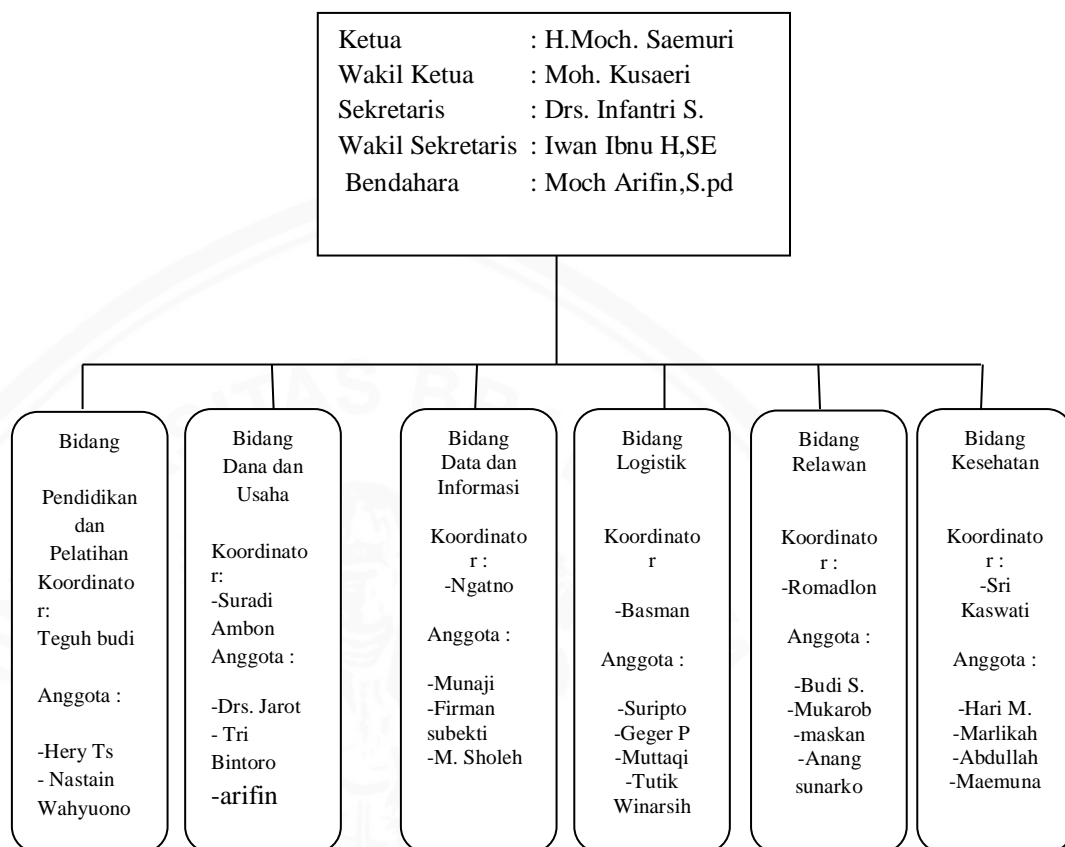
“...Dalam memonitoring program BPBD, pihak kecamatan bekerjasama dengan kelurahan agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran. Karena dirasa penting program tersebut, kita juga memfasilitasi semua program yang BPBD butuhkan agar program tersebut berjalan dengan lancar...”(hasil wawancara 06 Maret 2018 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurul Misbah dan Ibu Siti Aminah program BPBD yang diimplementasikan telah dimonitoring sampai tingkat kecamatan bahkan desa. Hal ini sangat dibutuhkan demi terciptanya program BPBD yang tepat sasaran. Menyikapi Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012, diharapkan sebagai langkah mitigasi pra bencana yang dibentuk BPBD. Rencana Aksi Komunitas Kelurahan Babat (RAK) Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit (FPRBBB) merupakan lembaga pendukung pemerintah desa dalam mengurangi resiko bencana yang dipimpin oleh ketua. Hal tersebut yang diungkapkan

oleh Bapak H.Mochamad Saemuri selaku ketua Rencana Aksi (RAK) Komunitas Kelurahan Babat Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit (FPRBBB) Kelurahan Babat yang menyatakan, Rencana Aksi Komunitas (RAK) ini bertujuan sebagai bentuk perencanaan pembangunan desa dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui kegiatan nyata bagi masyarakat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kelurahan babat yang mengacu pada rencana penanggulangan bencana desa, dalam rangka mewujudkan desa tangguh. Berikut pemaparan wawancara dengan Bapak H.Mochamad Saemuri selaku ketua Rencana Aksi Komunitas (RAK) Kelurahan Babat Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit (FPRBBB) dan gambar stuktur organisasi Rencana Aksi Komunitas (RAK) Kelurahan Babat Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit (FPRBBB) :

“BPBD terus mengupayakan program penanggulangan bencana salah satunya membentuk Rencana Aksi Komunitas (RAK) Kelurahan Babat Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit (FPRBBB) ini merupakan lembaga penanggulangan bencana tingkat kelurahan , jadi kita mengkoordinir masyarakat kelurahan melalui lembaga ini agar mempermudah BPBD dalam penanggulangan bencana.” (hasil wawancara 28 Maret 2018 pukul 10.30 WIB).

Gambar 4.9
Struktur Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat
Bangkit Tahun 2017



Sumber : Perkel Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Dari hasil penjelasan di atas menjadikan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memang sudah melaksanakan sosialisasi dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit. Tujuan dari pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Babat Bangkit ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, meningkatkan pengetahuan dan ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko

bencana di wilayah rawan bencana, dan meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini baru di bentuk di kelurahan babat saja, seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih meratakan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini di setiap kelurahan yang berpotensi bencana di kecamatan Babat. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bapak Mochamad Saemuri selaku Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan Babat yakni :

“ di Kecamatan Babat sendiri masih di Kelurahan Babat saja mbak soalnya di sini merupakan daerah rawan banjir. Setahu saya pembentukan Forum Pengurangan risiko Bencana baru di kelurahan babat saja, di kelurahan lainnya masih belum ada. (hasil wawancara 30 Maret 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Zaini selaku sekretaris kepala pelaksana BPBD Lamongan yakni :

“ Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana selama ini masih dibentuk di kelurahan babat saja. Kami (BPBD) kedepannya juga akan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana ini di setiap kelurahan rawan bencana yang ada di Kabupaten Lamongan .” (hasil wawancara 30 Maret 2018 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi upaya penanggulangan banjir sudah berjalan sampai tingkat desa, akan tetapi masih ditemukannya beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pernyataan Bapak Mohammad selaku masyarakat yang terkena bencana banjir menjelaskan adanya kendala dalam melaksanakan program tersebut

dikarenakan faktor alam. Hujan yang turun menerus pada musim kemarau ini membuat debit air bengawan solo terus naik sehingga bengawan tidak dapat dikeruk (normalisasi). Sedangkan kendala lain yang dihadapi BPBD adalah wewenang pengerukan rawa berada di Dinas Pertanian, butuh kerjasama dan koordinasi terlebih dahulu untuk melaksanakan program tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Gunawan sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“kendala yang dihadapi selama ini yaitu wewenang, dalam upaya normalisasi rawa itu bukan hak kita (BPBD) sepenuhnya melainkan wewenang tersebut dipegang Dinas Pertanian. Kita kesulitan dalam normalisasi rawa, namun dalam normalisasi bengawan ya tergantung debit airnya bengawannya” (hasil wawancara 27 Maret 2018 pukul 12.45 WIB).

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Mohammad selaku masyarakat korban bencana banjir Kelurahan Babat yang menyatakan sebagai berikut:

“ permasalahan yang kita hadapi menurut saya ya hujan yang terus-menerus itu mbak jadi bikin air bengawan terus naik ditambah akses jalan yang rusak dan tergenang air. Sehingga menyebabkan terjadinya banjir”(hasil wawancara 29 Maret 2018 pukul 15.00 WIB).

Gambar 4.10
Akses Jalan Kelurahan yang Terendam Banjir



Sumber : Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa betapa sulitnya dalam mengupayakan program tersebut. Curah hujan yang tidak menentu sering datang di musim kemarau sehingga debit air bengawan terus naik, akses jalan darat yang rusak dan tergenang air ketika terjadi bencana banjir dan tidak mempunyai wewenang penuh dalam pengerukan rawa. Belum optimalnya setiap program yang diberikan pemerintah daerah juga berpengaruh besar, perlu adanya inisiatif program yang secara signifikan akan mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan banjir ini.

b. Peningkatan Kompetensi Mitigasi dalam penanggulangan banjir.

Salah satu peran dari pemerintah daerah adalah sebagai pembuat kebijakan atau bisa disebut regulator, dalam melaksanakan perannya sebagai regulator atau pembuat kebijakan pemerintah membutuhkan upaya-upaya yang menjalankan peran regulator yang

dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan. Upaya yang dilakukan BPBD adalah membuat suatu perencanaan atau regulasi-regulasi yang mendasari suatu kebijakan dalam mengurangi resiko dan dampak dari bencana banjir yang ditimbulkan. Dengan adanya suatu regulasi diharapkan penanggulangan bencana di Kabupaten lamongan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat saran dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Zaini selaku sekretaris Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan , yakni :

“ tingkat pelayanan SKPD BPBD Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pedoman penyusunan operasional terhadap penanggulangan bencana, penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat, penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan atau bantuan dan pelaporan penanggulangan bencana”(hasil wawancara 27 Maret 2018 pukul 08.00 WIB).

hal yang sama seperti disampaikan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , yakni :

“untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya penegak hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) , persiapan , dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif, menjadi prasyarat penting yang harus dipenuhi menjadi kebijakan yang lebih komprehensif”.(hasil wawancara 26 Februari 2018 pukul 09.30 WIB).

Menurut pernyataan Bapak Zaini dan Bapak Gunawan bahwa BPBD sebagai fungsi regulator mempunyai tugas untuk membuat

suatu peraturan atau regulasi dalam hal penanganan bencana di wilayah Kabupaten Lamongan. Menyikapi Perda Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja lain Kabupaten Lamongan, fungsi BPBD salah satunya adalah perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Menurut Bapak Zaini selaku Sekretaris Kepala Pelaksanan BPBD Kabupaten Lamongan mengungkapkan perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana melalui pembuatan dokumen seperti, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang (RTRW), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA). Berikut pernyataan Bapak Gunawan :

“dalam perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana kita berpatokan dalam dokumen RPJP, RPJM, RKPD, RTRW, RENSTRA, dan Renja. Dalam hal dokumen tersebut kita nantinya dapat membuat dokumen sendiri tentang penanggulangan bencana seperti, peta rawan bencana, Jalur evakuasi bencana, indeks rawan bencana, pengurangan risiko bencana, rencana aksi komunitas”(hasil wawancara 24 Februari 2018 pukul 12.00 WIB).

Pendapat Bapak Zaini tersebut dikuatkan dengan pendapat Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menyatakan :

“Pembuatan dokumen penanggulangan bencana seperti Peta Rawan Bencana, Jalur Evakuasi bencana dan lainnya itu kita berpedoman pada RPJP, RPJM, PTRW Kabupaten Lamongan yang kemudian dapat kita olah menjadi dokumen penanggulangan

bencana seperti yang saya sebutkan”(hasil wawancara 25 Februari 2018 pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zaini dan Bapak Gunawan dokumen untuk pembuatan kebijakan selanjutnya berpedoman pada RPJP, RPJM, RTRW, maupun dokumen lainnya. Akan tetapi dalam perumusan suatu kebijakan harus melibatkan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang secara teknis dalam penanganan masalah banjir di Kabupaten Lamongan. Hal ini yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan, yakni :

“BPBD tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung, apabila terjadi bencana BPBD mengusulkan ke pemerintah daerah maupun dinas-dinas terkait dan diperlukan rapat koordinasi terlebih dahulu. (hasil wawancara 07 maret 2018 pukul 12.30 WIB).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan peningkatan kompetensi mitigasi fungsi regulator ini sangat penting, dikarenakan menjadi titik awal atau pedoman dalam pelaksanaan atau upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Lamongan. Perumusan strategi kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan bersama dengan dinas terkait dalam suatu forum, dengan melihat data atau fenomena banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya jika rumusan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Harapannya dengan kebijakan yang telah dibuat

tersebut, pelaksanaan atau implementasi program dan kegiatan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Analisis Data

1. Mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Babat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

a. Program Mitigasi Penanggulangan Banjir

Program mitigasi bencana bertujuan tidak lain agar jumlah korban jiwa dan harta benda penduduk dan juga kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini senada dengan tujuan mitigasi yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi resiko bencana baik melalui penataan tata ruang yakni secara fisik maupun non fisik yakni penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Program-program suatu kebijakan akan diimplementasikan ke dalam program-program yang dapat dipraktekkan dilapangan. Melalui program-program ini suatu kegiatan suatu lembaga akan terkoordinir. Nugroho (2004:158) menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui

formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Adapun program-program mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan di kelurahan Babat adalah :

- 1) Pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Untuk upaya penanggulangan bencana dalam daerah, saat ini sudah dibentuk model desa tangguh bencana. Dibentuknya desa ini sebagai upaya pengelolaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Masyarakat dalam kawasan rawan bencana merupakan pihak-pihak yang memberikan pertolongan pertama saat bencana terjadi. Untuk menjadikan desa atau masyarakat yang tangguh, masyarakat harus meningkatkan kapasitas untuk mengimbangi atau menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman yang ada disekitarnya. Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana sehingga dapat terhindar dari bencana itu sendiri. Hal ini sesuai pernyataan dari Ibu Siti Aminah selaku lurah Kelurahan Babat.

Di dunia Internasional dikenal dengan istilah *resilent*, menurut dokumen UN-ISDR, *resilent* adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang berpotensi terdapat bahaya, untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman, memiliki

mekanisme bertahan dan mampu memulihkan diri terhadap dampak bencana Nurjanah, (2012:114).

Sumberdaya setempat perlu digali dan digunakan secara maksimal sebelum menerima bantuan dari luar. Di setiap desa atau daerah harus tersedia sumberdaya yang diperlukan untuk penanggulangan bencana secara memadai. Masyarakat harus menjadi pelaku utama untuk menciptakan ketahanan dan keselamatan terhadap bencana menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.

2) Sosialisasi Kepada semua lapisan masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana

Sosialisasi merupakan bentuk dari salah satu fungsi manajemen yang termasuk *Direction* yaitu memberikan arahan. *Emest Dale* mengungkapkan bahwa *Direction* bukan saja menyatakan kepada orang apa yang harus dilakukan mereka, tetapi memastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam setiap situasi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan mereka Winardi, (2000:165).

Sosialisasi yang dimaksud diatas yaitu memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana pentingnya mitigasi, dan apa saja yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana pada tahap mitigasi bencana guna meminimalisir dampak bencana.

3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan bersama dengan melibatkan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas masyarakat itu sendiri untuk menghadapi risiko bencana yang mereka hadapi. Keterlibatan langsung masyarakat dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengurangan risiko risiko ditingkat lokal yaitu lingkungan masyarakat adalah suatu keharusan. Dengan melakukan latihan bersama dengan semua komponen penanggulangan bencana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan pengurangan resiko bencana pada lingkungannya.

Sumber daya mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam berjalannya suatu program atau kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh George Edward III bahwa implementasi kebijakan efektif jika dipengaruhi oleh empat variable yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures* Nugroho, (2006:140).

4) Koordinasi dengan semua lapisan masyarakat

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evaluasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang

berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Mitigasi bencana dan tindakan-tindakan antisipasinya adalah syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana alam. Pemerintah dalam kebijakannya harus memprioritaskan program mitigasi bencana. Pemerintah dalam kebijakannya harus memprioritaskan program mitigasi bencana. Dalam melaksanakan mitigasi terhadap bencana, sangat perlu diperhatikan tentang karakter dari kejadian bencana yang kan dan mungkin terjadi, sehingga dalam aspek-aspek pembangunan perhatian terdapa kaidah-kaidah kebencanaan harus lebih diperkuat lagi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program mitigasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Lamongan yaitu Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) cukup baik, dengan upaya mitigasi kegiatan yang

dilakukan berupa sosialisasi, simulasi, pelatihan-pelatihan, sehingga masyarakat lebih sadar dan paham mengenai masalah bencana.

b. Aktor yang terlibat dalam mitigasi penanggulangan banjir

Setiap pelaksanaan program-program pasti ada aktor yang terlibat dari berbagai bidang. Keberhasilan program penanggulangan bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, yang meliputi pemerintah, masyarakat serta lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Zaini selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan. Kerjasama berbagai pihak ini akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk penanggulangan bencana yang efektif. Interaksi *civil society* yang meliputi pemerintah, organisasi kemanusiaan dan masyarakat merupakan sebuah kekuatan untuk keberlanjutan penanganan bencana yang lebih cepat dan efektif, secara *shorter* dan *longterm* meliputi wilayah lokal dimana bencana terjadi Purnomo Hadi, (2010:98).

Daerah rawan bencana di Kelurahan Babat sangatlah luas, tidak mungkin pemerintah mampu menjangkau semua lokasi rawan bencana, maka dari itu keterlibatan dari semua pihak akan mempercepat penanggulangan bencana. Perda No. 4 Tahun 2011 merupakan dasar hukum pembentukan BPBD Kabupaten Lamongan yang sebagai aktor pelaksana di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan BPBD tidak bergerak sendiri, BPBD di

bantu oleh dinas-dinas dari pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kompeten terkait lainnya. Untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, BPBD bekerjasama dengan TNI (Kodim 0812 beserta jajarannya), Polres Lamongan (beserta jajarannya), Basarnas, SAR Lamongan dan PMI. Untuk penanganan pengungsi, BPBD bekerja sama dengan Disnakertrans. Untuk pengembangan sistem peringatan dini, BPBD bekerja sama dengan Dinas Pengairan dan Pertambangan dan BMKG dan didukung oleh instansi yang terkait dengan penelitian seperti perguruan tinggi, maupun lembaga swasta terkait lainnya.

Dukungan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana. Karena keterbatasan jumlah personil BPBD Kabupaten Lamongan, biaya, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah. Dengan demikian masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana merupakan aktor pendukung pelaksana implementasi penanggulangan bencana, yang dapat mendorong Pemerintah maupun BPBD Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan mitigasi bencana banjir.

c. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi penanggulangan banjir

Penanggulangan bencana oleh masyarakat merupakan proses untuk mendorong masyarakat di kawasan rawan bencana mampu secara mandiri menangani ancaman yang ada di lingkungannya dan

kerentanan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu masyarakat yang menghadapi risiko perlu terlibat secara aktif dalam identifikasi, analisis, tindakan, pemantauan dan evaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ini berarti bahwa komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak Zaini selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Lamongan.

Perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah khususnya wilayah bencana, merupakan hal yang penting. Adanya grup komunitas yang terbentuk kelompok masyarakat, pos koordinasi, pada saat setelah peristiwa bencana merupakan kontribusi yang sangat besar bagi kesuksesan proses *response* dan *recovery* Purnomo Hadi, (2010:107).

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sudah tertulis didalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 26 menuliskan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu hak masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

d. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi penanggulangan banjir

Dengan banyaknya instansi atau organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan implementasi pendukung tugas dan fungsi BPBD yaitu mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lamongan. Instansi atau organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana banjir. Sehingga mitigasi bencana banjir dapat teratasi dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BPBD Kabupaten Lamongan mewujudkan sistem penanganan kedarutan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.

2. Usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kelurahan Babat Kabupaten Lamongan :

a. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir

Mitigasi merupakan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya, (2014). Selanjutnya menurut Ulum, (2014) menjelaskan bahwa mitigasi merupakan salah satu cara yang terbaik yang berkontribusi untuk rencana adaptasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan mitigasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan

pedoman daerah masing-masing yang telah disepakati sebelumnya. Ada dua jenis mitigasi, yaitu struktural dan non struktural. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang kusumasari, (2014). Kegiatan mitigasi struktural ini berupa pembangunan infrastruktur atau fisik untuk meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi. Selanjutnya mitigasi non-struktural merupakan pengurangan risiko melalui peyusunan berbagai peraturan, pengelolaan tata ruang dan pelatihan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nurul Misbah selaku Sekretaris Camat Kecamatan Babat mengungkapkan bahwa saat ini BPBD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan mitigasi bencana banjir, baik upaya struktural maupun non-struktural. Mengingat pentingnya sebuah mitigasi tersebut karena akan berdampak langsung kepada masyarakat, program dan kegiatan yang telah dilakukan BPBD harus dimonitoring dan diawasi pelaksanaannya sampai di Kecamatan bahkan Desa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana menurut Nurjanah, (2011) meliputi (1) dalam situasi tidak terjadi bencana dan (2) dalam situasi terdapat potensi bencana terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi (1) perencanaan penanggulangan

bencana, (2) pengurangan risiko bencana, (3) pencegahan, (4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, (5) persyaratan analisis risiko bencana, (6) pelaksanaan dan penegakan tata ruang, (7) pendidikan dan pelatihan, dan (8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam tahapan kegiatan pra bencana melalui mitigasi bencana.

Sesuai dengan teori di atas kegiatan pengurangan resiko bencana atau mitigasi dilaksanakan agar dalam implementasi program dan kegiatan mitigasi banjir akan berjalan dengan baik. Menurut Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan menyebutkan beberapa program seperti normalisasi bengawan dengan cara dikeruk, pemasangan pompa air sedangkan yang non fisik adalah sosialisasi membentuk kesadaran masyarakat tentang membuang sampah dan alih fungsi lahan.

Menyikapi Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman Desa Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain : penanggulangan bencana berbasis masyarakat, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana

pembangunan. Selain mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 3 tahun 2008 diatas, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemanduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Soemuri selaku Ketua Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat mengungkapkan BPBD terus mengupayakan program penanggulangan bencana salah satunya membentuk Desa Tangguh Bencana Kelurahan Babat. Desa Tangguh Bencana ini merupakan lembaga penanggulangan bencana tingkat desa. Namun pembentukan hanya di bentuk di Kelurahan Babat saja.

Selanjutnya masyarakat Kelurahan Babat juga berperan dan berupaya langsung dengan inisiatif sendiri dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan maupun desa. Menurut Bapak Nurul Misbah selaku Sekretaris Camat Kecamatan Babat yang menjelaskan masyarakat ikut berperan secara langsung dalam mitigasi bencana seperti bergotong royong memperkuat tanggul di bengawan solo karena rawan jebol dengan cara mengisi karung pasir dan di taruh di tanggul tersebut.

Berkenaan dengan Bapak Nurul Misbah tentang masyarakat menerima baik dan mendukung upaya yang dilakukan BPBD ataupun yang lainnya. Namun dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan yakni hujan yang turun terus menerus pada musim kemarau ini membuat debit air bengawan naik sehingga tidak dapat

dikeruk (normalisasi). Sedangkan kendala lain yang dihadapi BPBD adalah wewenang pengerukan rawa berada di pihak Dinas Pertanian, butuh kerjasama dan koordinasi terlebih dahulu untuk melaksanakan program tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa upaya mitigasi banjir yang dilakukan BPBD baik secara struktural maupun non struktural sudah sampai pada Kelurahan Babat Kecamatan Babat. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa hambatan seperti masih ditemukannya egosektoral dari masing-masing dinas yang mempunyai kewenangan secara teknis, selain itu, faktor alam hujan yang datang pada musim kemarau yang mempengaruhi normalisasi bengawan. Hambatan-hambatan yang muncul di atas harus dapat diminimalisir agar implementasi program dan kegiatan mitigasi banjir dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

b. Peningkatan Kompetensi Mitigasi dalam bencana banjir.

Dalam mengantisipasi dampak buruk dari bencana di masa depan, pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah membuat kemajuan yang signifikan dengan membuat kebijakan daerah yang sensitif terhadap bencana. Pembuatan kebijakan merupakan salah satu peran dari pemerintah daerah, dalam melaksanakan perannya merupakan salah satu peran dari peran pemerintah daerah, dalam melaksanakan perannya sebagai pembuat kebijakan membutuhkan upaya-upaya yang menjalankan kebijakan yang dilaksanakan dan

dirumuskan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan.

Tingsanchali (2005) menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan yang mendukung berdampak positif pada keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan tersebut harus ditetapkan dan diberlakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk menilai kapabilitas pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana dalam hal kebijakan yang mendukung menurut Kusumasari (2014) dapat dinilai dari pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, ketersediaan kebijakan, aturan dan peraturan yang tepat untuk membuat keputusan dan memobilisasi sumber daya serta melibatkan organisasi publik dan swasta yang terkait. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam program pembangunan daerah tercantum pada RPJD, RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RKA SKPD serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana disetiap daerah menjadi hal yang penting terutama daerah-daerah yang memiliki Indeks Resiko Bencana (IRB) tinggi. Seperti Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang itu

juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang penanggulangan bencana. Setelah terbitnya Perda tersebut, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain Kabupaten Lamongan. Yang menandakan terbentuknya dan terisinya organisasi BPBD Kabupaten Lamongan.

Dari wawancara dengan Bapak Zaini selaku Sekretaris Kepala Pelaksana dan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa peraturan daerah terkait penanggulangan bencana berpedoman pada dokumen RPJMD, RKPD, RTRW, RENSTRA dan RENJA. Dalam dokumen tersebut nantinya akan kami pertimbangan dalam pembuatan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana seperti, pembuatan Peta Rawan Bencana. Rencana penanggulangan bencana, pembuatan jalur evakuasi bencana, pengurangan risiko bencana, dan lainnya.

Penyusunan kebijakan ini melibatkan pemangku kepentingan di daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perumusan kebijakan ini dilaksanakan melalui sebuah forum resmi yang melibatkan BPBD sebagai unsur pelaksana utama dengan beberapa dinas yang mempunyai kewenangan teknis dalam profesional dan ahli. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan yang membenarkan bahwa BPBD tidak bisa mengambil

kebijakan secara langsung apabila terjadi bencana BPBD mengusulkan ke pemerintah daerah maupun secara langsung apabila terjadi bencana BPBD mengusulkan ke pemerintah daerah maupun dinas-dinas terkait dan diperlukan rapat koordinasi terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi mitigasi penanggulangan dibutuhkan dokumen penunjang seperti, RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RKA SKPD serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kemudian dijadikan acuan untuk pembuatan kebijakan penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD sebagai aktor utama harus dapat mengatur komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait agar dalam upaya implementasi kebijakan program kegiatan dapat dengan baik dan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat” (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan) sebagai berikut :

1. Program Mitigasi yang meliputi, Pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
2. Aktor yang terlibat meliputi, Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha
 - Peran dari masing-masing aktor meliputi :
 - a. Peran Pemerintah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan) sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dan menyusun, menetapkan, serta menginformasikan peta rawan bencana.
 - b. Peran Masyarakat sebagai pendukung berjalannya program mitigasi
 - c. Peran Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah atau badan serta menginformasikannya kepada publik secara transparan juga menyesuaikan program kerjanya yang berbasis

lingkungan dalam bentuk penanggulangan bencana dalam lembaga usaha.

- d. Hubungan atau Koordinasi terhadap mitigasi bencana banjir meliputi, sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, sehingga mudahnya masyarakat setempat di ajak gotong royong melakukan kegiatan-kegiatan dalam memaksimalkan program mitigasi bencana tersebut
3. Respon Masyarakat (tindakan) dalam mitigasi bencana banjir meliputi, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Dukungan yang dilakukan terhadap mitigasi bencana banjir meliputi, koordinasi dengan semua lapisan masyarakat

Usaha yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kelurahan Babat Kabupaten Lamongan diantaranya:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lamongan menyebutkan beberapa program seperti normalisasi bengawan dengan cara dikeruk, pemasangan pompa air sedangkan yang non fisik adalah sosialisasi membentuk kesadaran masyarakat tentang membuang sampah dan alih fungsi lahan.
2. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan.
3. Selanjutnya masyarakat Kelurahan Babat juga berperan dan berupaya langsung dengan inisiatif sendiri dan dikoordinasikan dengan pihak

kecamatan maupun desa seperti bergotong royong memperkuat tanggul di bengawan solo karena rawan jebol dengan cara mengisi karung pasir dan di taruh di tanggul tersebut

4. Peningkatan kompetensi mitigasi dalam penanggulangan banjir.

B. Saran

1. Perlu meningkatkan Sarana dan Prasarana mitigasi bencana banjir di Kelurahan Babat misalnya dengan cara pembangunan *Drainase* untuk mengurangi debit air dari sungai Bengawan Solo dan meninggikan tanggul Bengawan Solo.
2. Perlu adanya upaya pencegahan dengan menanam pohon agar resapan air lebih optimal
3. Lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat di Kelurahan Babat misalnya mengajak masyarakat terjun langsung ke lapangan tentang pentingnya mitigasi bencana khususnya bencana banjir
4. Partisipasi aktif baik berupa tenaga pikiran maupun material untuk mencegah terjadinya bencana banjir

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. *Bencana Banjir dan Korban Kerusakan 2015*. Jakarta : BNPB (diakses pada tanggal 18 Oktober 2015).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. *Panduan Perencanaan Kontigensi (edisi kedua) tahun 2011*. Jakarta : BNPB (diakses pada tanggal 17 September 2011).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. 2017. *Profil BPBD Lamongan*. Melalui <https://lamongankab.go.id/bpbd/> diakses pada tanggal 3 November 2017.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. *Jumlah Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan tahun 2017*. Lamongan : BPBD (diakses pada bulan januari-februari 2017).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. *Jumlah Terdampak Bencana banjir di Kabupaten Lamongan Tahun 2018*. Lamongan : BPBD (diakses pada bulan januari-februari 2018).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2017*. Lamongan.
- Bappenas. 2015. *Kajian Kelembagaan dan Regulasi Untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2016*. Diakses pada tanggal 10 Oktober tahun 2017.
- H. A. R Tialar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf, A. S. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kodoatie, Robert J. 2013. *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Yogyakarta: Andi.

- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapasitas Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, J. 2013. *Qualitative Data Analisis : Methods Source Book*. SAGE Publication.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant D, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D, 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan*. Lamongan : Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Desa Tangguh Bencana*.
- Puturuhi, Ferad. 2015. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan jauh*. Yogyakarta : GraKa Ilmu.
- Purnomo, Hadi dan Sugiantoro, Ronny. 2010. *Manajemen Bencana Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Purwanto, Erwan Agus. 2008. *Pelayanan Publik Partisipatif Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Priambodo, S Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Teruna Grafica.

- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2012. *Metedologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Tim UB Press.
- Syamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang.
- Ulum. M. Chazienul. 2014. *Manajemen Bencana*. Malang:UB Press.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Winardi, 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zauhar, Soesilo. 2001. *Administrasi Publik*. Malang : Universitas Negeri Malang.

LAMPIRAN 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Lamongan memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
- c. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dan sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka penanggulangan bencana di daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN 2

Sosialisasi Pencegahan Bencana di Kelurahan Babat



